

# **PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PADA INDUSTRI KERAJINAN MARMER**

(Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat  
Kabupaten Tulungagung)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**BERLINA PUSPA DEWI**

**NIM. 0610310041**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
MALANG  
2010**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
 PROGRAM STUDI : - ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK  
 - ADMINISTRASI NIAGA/ BISNIS  
 Jln. Mayjen Haryono No.163 Malang 65145  
 Telp. (0341) 551611 – 551615 Pes. 154-155 dan (0341) 553737 Fax. (0341) 553737

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA DAN  
 MENENGAH (UKM) PADA INDUSTRI KERAJINAN MARMER (Studi  
 Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten  
 Tulungagung)

Disusun oleh : BERLINA PUSPA DEWI

NIM : 0610310041

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Malang, 29 Januari 2010

**Komisi Pembimbing**

**Ketua**

**Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.**  
 NIP. 196 102 02 198 503 1 006

**Anggota**

**Drs. Trilaksono Nugroho, M.S.**  
 NIP. 195 807 15 198 601 1 001



**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 05 Februari 2010  
 Jam : 09.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Berlina Puspa Dewi  
 Judul : Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Industri Kerajinan Marmer (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)

**DINYATAKAN LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

**Ketua**

**Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.**  
 NIP. 19610202 198503 1 006

**Anggota**

**Drs. Trilaksono Nugroho, M.S.**  
 NIP. 191580715 198601 1 001

**Anggota**

**Drs. Heru Ribawanto, M.S.**  
 NIP. 19520911 197903 1 002

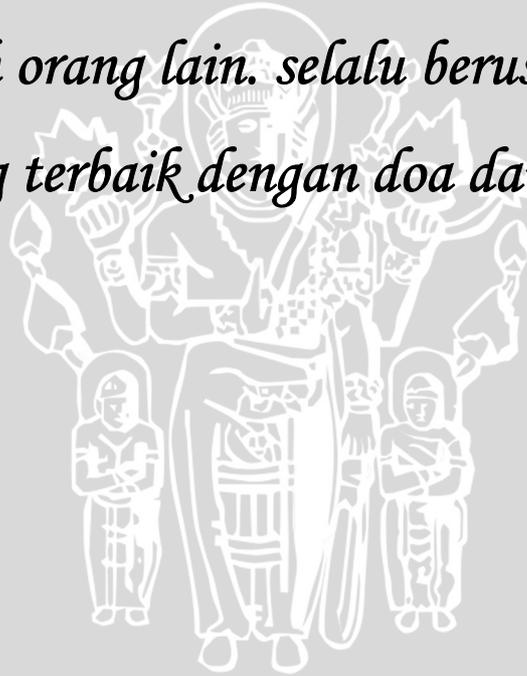
**Anggota**

**Drs. Muhammad Shobaruddin, M.A.**  
 NIP. 19590219 198601 1 001



## Motto

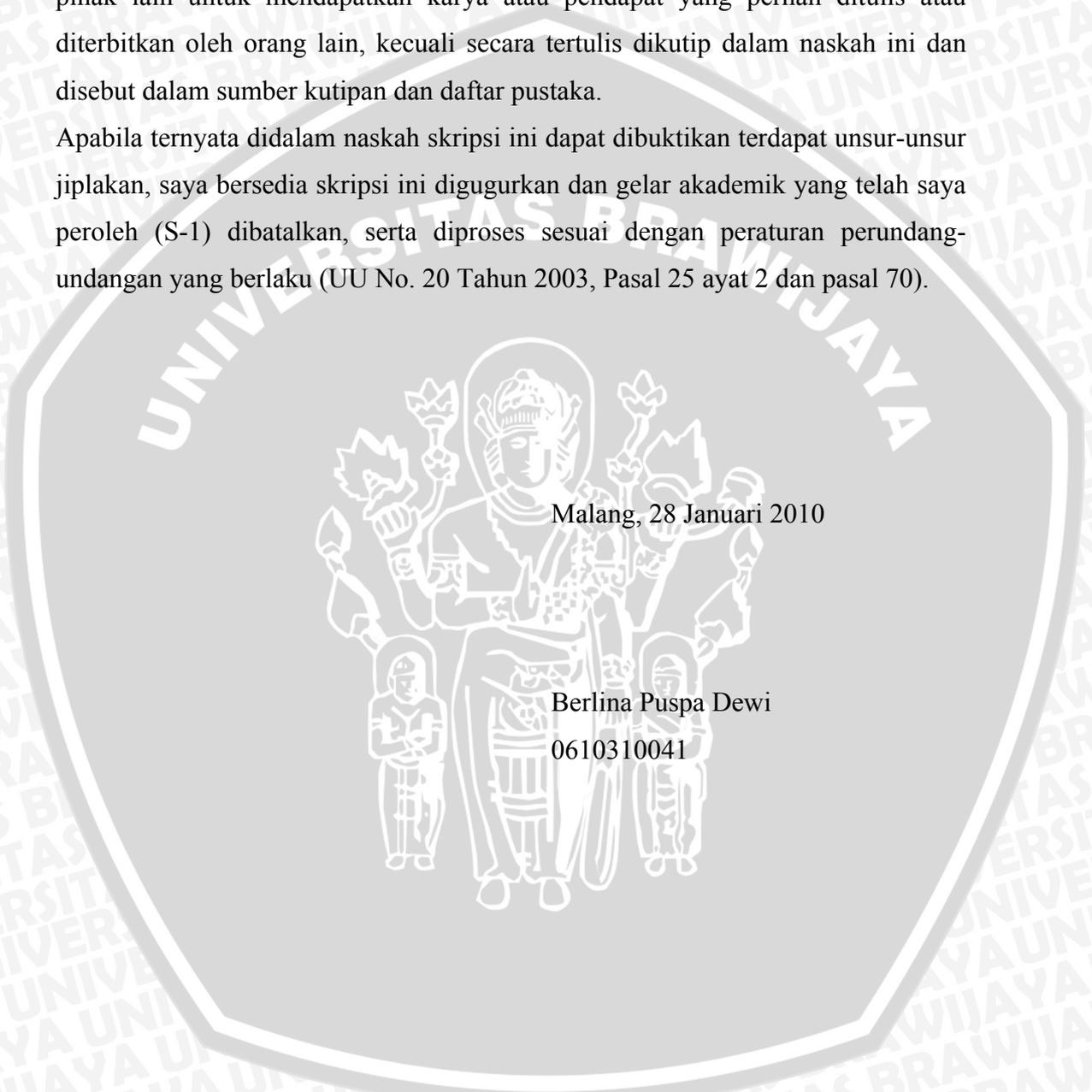
*Manfaatkan waktumu sebaik mungkin karena bila waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. dalam hidup ini, keindahan yang sejati adalah dimana kita menghargai dan dihargai oleh orang lain. selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan doa dan usaha...*



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, 28 Januari 2010

Berlina Puspa Dewi

0610310041

## RINGKASAN

Berlina Puspa Dewi, 2010 Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Industri Kerajinan Marmer (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), Prof Dr. Abdul Hakim, M.Si., Drs. Trilaksono Nugroho, M.S., 111 Hal + xv

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dalam rangka mempercepat pembangunan, membangun kemandirian, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya agar tercipta kegiatan ekonomi yang produktif, maka oleh pemerintah diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan Keuangan Pusat dan Daerah, kemudian kedua Undang-undang tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Oleh karena itu peran serta dari Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan industri kecil sangatlah diperlukan agar usaha industri kecil ini dapat berkembang lebih pesat.

Kabupaten Tulungagung yang pada umumnya didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam membuat daerah ini kaya akan potensi bahan galian gol C (batu gamping, marmer dan fosfat) mengakibatkan daerah ini berkembang menjadi sentra industri kerajinan batu marmer. Sentra industri ini tepatnya berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan pembuatan kerajinan marmer ini banyak dijumpai di sepanjang jalan menuju obyek wisata pantai popoh. Industri marmer ini merupakan primadona Kabupaten Tulungagung yang sudah banyak dikenal pembeli dari mancanegara. Akan tetapi akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 membawa dampak terhadap pengrajin marmer di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, khususnya Desa Gamping. Banyak pengrajin yang tidak mampu menjalankan usahanya karena berbagai permasalahan yang mengakibatkan banyak dari mereka yang menutup usahanya atau gulung tikar. Keadaan yang pasang surut membuat usaha tidak berjalan lancar sehingga sebagian pemilik usaha menutup usahanya. Hal inilah yang menuntut Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk berperan aktif

dalam memberdayakan industri marmer, mengingat kontribusi yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan fokus penelitian yaitu apa saja Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan industri marmer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberdayakan dan mengembangkan industri marmer, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berupaya dengan menyediakan modal usaha, fasilitasi teknologi, dan pembinaan sumber daya manusia. Penyediaan modal disini maksudnya pihak Disperindag Kabupaten Tulungagung mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi dan bantuan modal yang telah dianggarkan bagi para pengrajin yang akan mengajukan kredit.

Pada fasilitasi teknologi dan pembinaan SDM, Disperindag Kabupaten Tulungagung mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para pengrajin marmer, namun tidak dapat rutin diadakan karena harus bergantian dengan industri kecil yang lainnya. Bantuan pemasaran disini Disperindag Kabupaten Tulungagung mengikutsertakan para pengrajin dalam acara pameran-pameran, mengingat pemasaran masih menjadi kendala.

Selain itu hasil penelitian melihat perkembangan industri marmer dari beberapa hal yaitu: jumlah pengrajin yang sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, sedangkan jumlah tenaga yang terserap mengalami penurunan tidak seperti jumlah pengrajin yang terus meningkat, untuk tingkat pendapatan yang diperoleh dari pengrajin dan buruh yang bekerja sangat bergantung pada permintaan akan kerajinan marmer, apabila dilihat dari segi pemasaran hasil usaha dan modal usaha tetap menjadi kendala bagi industri kecil. Oleh sebab itu dengan sulitnya pemasaran produk kerajinan marmer, Bupati Tulungagung meminta pengrajin untuk melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dan memenuhi selera pasar.

Di sisi lain penelitian juga menunjukkan adanya beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan industri marmer. Adanya pembangunan dan otonomi daerah telah memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk memiliki peran yang lebih dalam mengembangkan industri marmer dan dalam perannya untuk memberdayakan industri tersebut terdapat suatu kebijakan yang disebut dengan RIPPIK (Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan), sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya tenaga teknis yang tersedia dan minimnya dana yang dianggarkan untuk dapat mengadakan kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan.

## SUMMARY

Berlina Puspa Dewi, 2010. The Government's Role in the Small and Medium Enterprises' Empowerment at Marble Handcraft (A Case Study at Gamping Village, Campurdarat Subdistrict, Tulungagung Regency). Supervisor: Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si. Co-supervisor: Drs. Trilaksono Nugroho, M.S. 111 pages + xv

The development can be defined as a set of exertions to realize the expected and planned growth and change by a nation state to arrive at the modernity in the nation-building framework. Considering the demands of development acceleration, self-support building, and the distribution of development and the output throughout the locals by giving a chance for the locals to produce a productive economical activity, the government issues Act No.2 of 1999 on The Local Government and Act No. 25 of 1999 on the Balance Between Central and Local Finance Authorities. Both Acts seem amended with the issue of Act No.32 of 2004 and Act No.33 of 2004. Therefore, the local government has an important role in planning and developing small industries.

Tulungagung Regency seems geographically dominated by the structure of various stones. Indeed, this regency has been enriched by mining material class C (limestone, phosphate-clan marble). This industrial center precisely remains at Campurdarat Subdistrict, Tulungagung Regency. The marble handcraft can be seen along the road toward the Popoh Beach Tourist Resort. This marble industry must be the primary business of Tulungagung Regency as widely known by the foreigner. The economic crisis affects Indonesian in 1997, bringing with the great impact on the marble artisans at Campurdarat Subdistrict, Tulungagung Regency, especially in Gamping Village. Many artisans fail to keep with the business due to some problems, only resulting in the bankruptcy or the closed enterprise. This unstable trend really provides the difficult choice to the entrepreneurs. Therefore, the government of Tulungagung Regency, through its Industry and Trade Official of Tulungagung Regency, takes an active action to empower the marble industry, taking account its contribution so far.

Research employs qualitative method with descriptive approach to focus on the role played by the government of Tulungagung Regency in

developing marble industry. The results of research show that in the process to develop and to empower the marble industry, the government of Tulungagung Regency works hard to provide business capital, technology facility, and the planning of human resource. The capital provision will be administered by the Industry and Trade Official of Tulungagung Regency with its authority to recommend and helped with give some capital to the artisans for credit application .

Taking account the technological facility and the planning of human resource, the Industry and Trade Official of Tulungagung Regency conducts a session of education and training for the marble artisans but with less periodical frequency because of the shared usage with other small industries. The marketing aid given by the Industry and Trade Official of Tulungagung Regency involves inviting the artisans to the show events.

Results of research also find some development indicators at marble industry. The previously small number of artisans starts to grow. The number of the absorbed workers into employment declines, while the number of artisans increases. The income received by the artisans and the workers relies on the demand of marble handcraft, especially seen from the marketing and the capital aspects in the small industries. Therefore, regarding to the difficulty of marketing for the marble handcraft products, the Reagent of Tulungagung requires the artisans to innovate the product to compete and to meet the market taste.

Research also examines the supporting and constraining factors faced by the government of Tulungagung Regency in developing the marble industry. The local's development and autonomy give a chance for the local government to have deep engagement to develop the marble industry and to improve its role to empower this industry. A policy called as RIPPIK (*Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan*) may exist as the result. The constraining factor concerns with the lack of technical worker and the limited fund to be budgeted for the supporting activities such as the education and training.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sesungguhnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Industri Kerajinan Marmer (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campudarat Kabupaten Tulungagung)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. MR. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
4. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I
5. Drs. Trilaksono Nugroho, M.S. selaku Dosen Pembimbing II
6. Ir. Supartono, M.M. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung
7. Ir. Budi Siswantoro selaku Kepala Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung
8. Ir. Hasan Bisri selaku Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung
9. I Wayan Suastama, S.E. selaku Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung
10. Seluruh Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

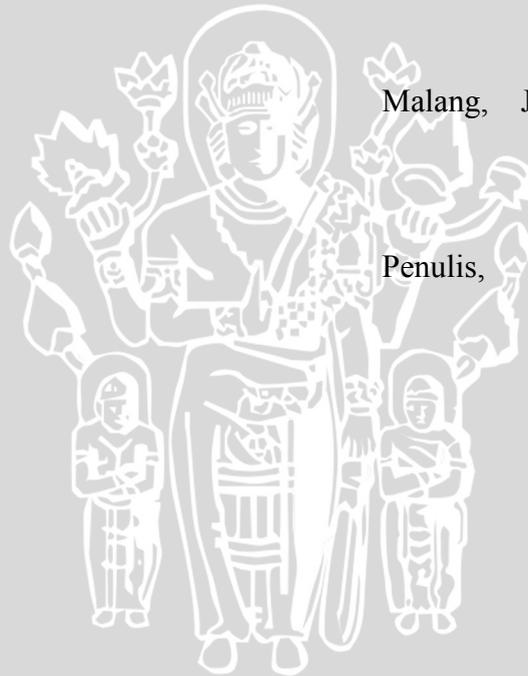
11. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukungku dan tidak bosan-bosannya untuk selalu mendoakanku serta
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam menyusun skripsi ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Malang, Januari 2010

Penulis,



## DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN	
ORISINALITAS .....	iii
RINGKASAN .....	iv
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kontribusi Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Konsep Pembangunan .....	10
2.1.1 Pengertian Pembangunan .....	10
2.1.2 Model-Model Pembangunan .....	12
2.1.3 Konsep Paradigma Pembangunan .....	13
2.1.4 Perkembangan Strategi Pembangunan .....	14
2.2 Peranan Pemerintah .....	17
2.2.1 Pengertian Peranan .....	17
2.2.2 Pengertian Peranan Pemerintah .....	18
2.2.3 Model Peranan Pemerintah .....	20
2.2.4 Peranan Pemerintah Terhadap Industri Kecil .....	21
2.3 Konsep Pemberdayaan .....	22
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan .....	22
2.3.2 Indikator Pemberdayaan .....	23
2.3.3 Tahapan Pemberdayaan .....	24
2.3.4 Strategi Pemberdayaan .....	26



2.3.5	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.....	28
2.3.5.1	Pengertian UKM .....	28
2.3.5.2	Karakteristik UKM.....	31
2.3.5.3	Peranan UKM .....	31
2.3.5.4	Kelebihan dan Kelemahan UKM.....	32
2.3.5.5	Masalah-Masalah UKM.....	35
2.3.5.6	Peluang dan Tantangan UKM.....	37
2.3.5.7	Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM .....	39
2.3.5.8	Strategi Pengembangan UKM.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>43</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	43
3.2	Fokus Penelitian.....	44
3.3	Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
3.4	Sumber Data .....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6	Instrumen Penelitian .....	46
3.7	Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	49
4.1.1	Kondisi Geografis.....	49
4.1.2	Topografi.....	49
4.2	Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.....	51
4.2.1	Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.....	51
4.2.2	Susunan Organisasi .....	52
4.2.3	Visi dan Misi .....	53
4.3	Gambaran Umum Kecamatan Campurdarat.....	53
4.3.1	Keadaan Geografis .....	53
4.4	Gambaran Umum Desa Gamping.....	55
4.4.1	Letak Geografis .....	55
4.4.2	Keadaan Penduduk Desa Gamping.....	56

4.5 Sejarah Perkembangan Industri Marmer di Kecamatan Campurdarat .....	57
4.6 Penyajian Data Fokus Penelitian .....	60
4.6.1 Peranan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pemberdayaan UKM Industri Kerajinan Marmer.....	60
4.6.1.1 Penyediaan Modal Usaha.....	65
4.6.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia .....	70
4.6.1.3 Pemanfaatan Fasilitas Teknologi .....	74
4.6.2 Dampak Peningkatan Hasil Usaha Sosial Ekonomi Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Marmer .....	77
4.6.2.1 Peningkatan Pendapatan .....	77
4.6.2.2 Pemasaran Hasil Usaha .....	79
4.6.2.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap.....	80
4.6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Atas Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Industri Kerajinan Marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung .....	82
4.6.3.1 Faktor Pendukung .....	82
4.6.3.2 Faktor Penghambat.....	84
4.7 Analisa dan Intepretasi Data .....	88
4.7.1 Peranan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pemberdayaan UKM Industri Kerajinan Marmer.....	88
4.7.1.1 Penyediaan Modal Usaha.....	90
4.7.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia .....	92
4.7.1.3 Pemanfaatan Fasilitas Teknologi .....	94
4.7.2 Dampak Peningkatan Hasil Usaha Sosial Ekonomi Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Marmer .....	96
4.7.2.1 Peningkatan Pendapatan .....	96
4.7.2.2 Pemasaran Hasil Usaha .....	96
4.7.2.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap .....	98

4.7.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Atas Pemberdayaan Industri Kerajinan Marmer..... 99

4.7.3.1 Faktor Pendukung ..... 99

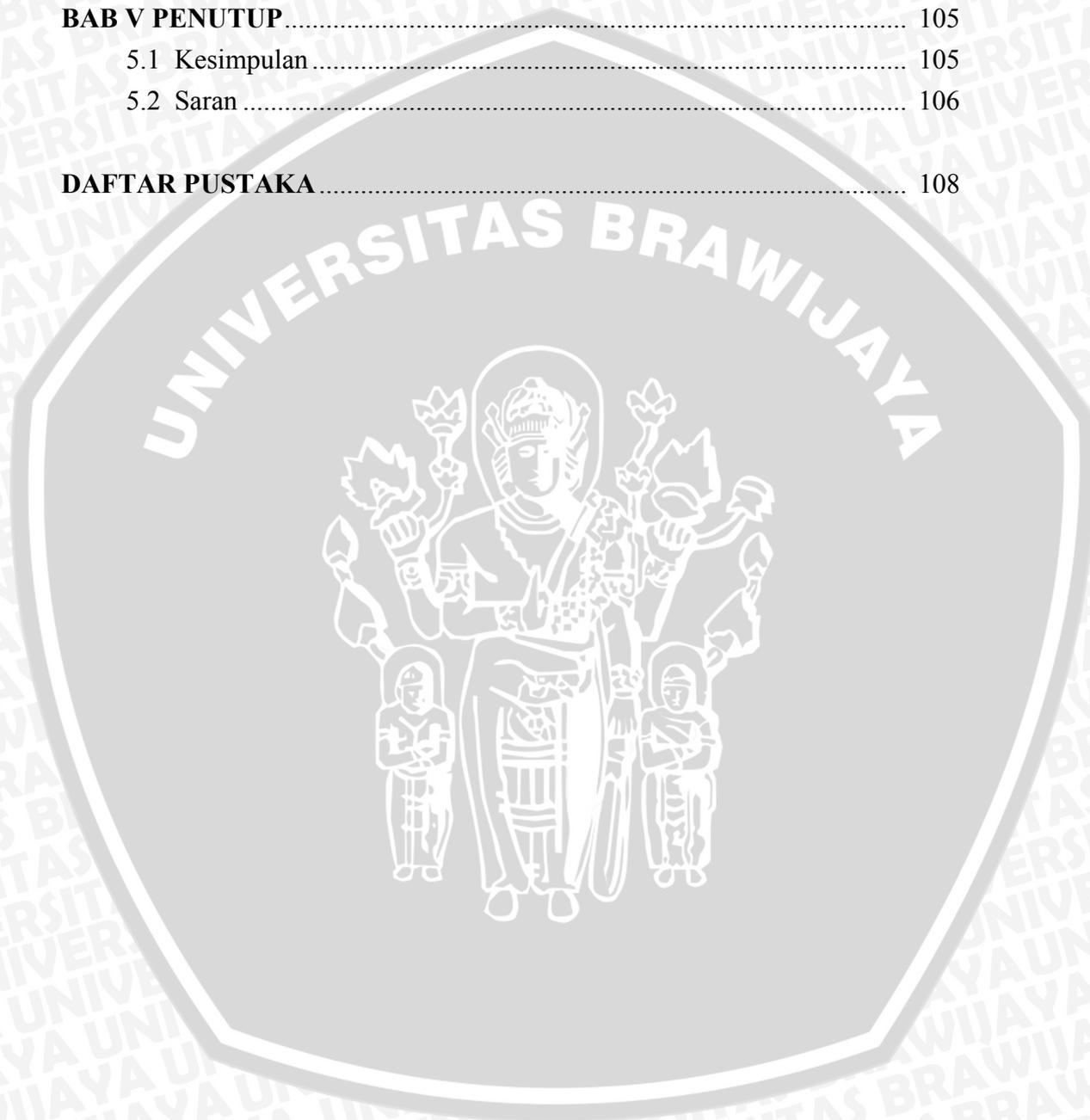
4.7.3.2 Faktor Penghambat..... 102

**BAB V PENUTUP**..... 105

5.1 Kesimpulan ..... 105

5.2 Saran ..... 106

**DAFTAR PUSTAKA**..... 108



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Tabel 4.1	Penduduk Tulungagung Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	50
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Campurdarat Menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2008	54
Tabel 4.3	Jumlah Pemeluk Agama Menurut Desa dan Agama yang Dianut Tahun 2008	54
Tabel 4.4	Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Menurut Desa dan Sektor Usaha Tahun 2008	55
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Desa Gamping Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008	56
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008	56
Tabel 4.7	Realisasi Dana Kredit UKM Dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008	69
Tabel 4.8	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UKM Industri Kerajinan Marmer Tahun 2008	81
Tabel 4.9	Komponen Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 3.1	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	48
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Tulungagung	50
Gambar 4.2	Mekanisme Pengajuan Kredit UKM	68
Gambar 4.3	Mekanisme Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan UKM Kabupaten Tulungagung	73



## DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan	Judul
Lampiran 1	Bagan Struktur Organisasi Disperindag Kabupaten Tulungagung
Lampiran 2	Formulir Pengajuan Kredit BPR Kedungwaru Tulungagung
Lampiran 3	Rekapitulasi Pengucuran Kredit UKM Bulan Oktober 2009
Lampiran 4	Daftar Nama Pemilik Usaha Industri Kerajinan Marmer
Lampiran 5	Gambar Proses Pembuatan Marmer
Lampiran 6	Gambar Produk Industri Kerajinan Marmer
Lampiran 7	<i>Curriculum Vitae</i>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan didefinisikan sebagai “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)” (Siagian, 2005:04). Dalam rangka mempercepat pembangunan, membangun kemandirian, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya agar tercipta kegiatan ekonomi yang produktif, maka oleh pemerintah diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan Keuangan Pusat dan Daerah, kemudian kedua Undang-undang tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Pembangunan nasional adalah suatu proses perubahan dan pertumbuhan dari kondisi yang kurang menguntungkan menuju ke arah yang lebih menguntungkan (lebih baik). “Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai” (Undang – Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 20 Tahun 2008 :22). Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. “Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya” (Siagian, 2005:05). Hal ini juga memberikan kontribusi penting

untuk meningkatkan kemajuan daerah dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah sehingga pertumbuhan industri atau usaha kecil sangat terkait dengan perkembangan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan industri, pertumbuhan industri kecil mulai menjadi topik yang cukup hangat sejak tahun 1980-an, yang didasari oleh pengalaman dari sentra-sentra Industri Skala Kecil (ISK) dan Industri Skala Menengah (ISM) di beberapa negara di Eropa Barat, khususnya Italia (Tambunan, 1999:84). Pengalaman Taiwan juga menunjukkan bahwa ekonominya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah Usaha kecil dan menengah yang disebut *community based industry*. Perkembangan industri modern di Taiwan yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi industri kecil yang dinamis, (Kuncoro, 2003:379).

Salah satu potensi suatu daerah yang keberadaannya cukup penting adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di Indonesia, dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, khususnya pada daerah pedesaan dan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, tidak bisa dipungkiri bahwa UKM menjadi sangat penting. “Selama ini kelompok usaha tersebut berperan sebagai salah satu motor penggerak bagi pembangunan ekonomi dan komunitas lokal. Pada tahun 2000, ada sekitar 38,99 juta UK dengan rata – rata penjualan pertahun kurang dari Rp. 1 milyar, atau sekitar 99,85% dari jumlah perusahaan di Indonesia. Pada tahun yang sama, ada 55.061 perusahaan dari kategori UM, dengan rata – rata penghasilan per tahun lebih dari Rp. 1 milyar tetapi kurang dari Rp. 50 milyar atau sekitar 0,41% dari jumlah unit usaha” (Tambunan, 2002:19).

Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. UKM di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, mendukung pendapatan rumah tangga dan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kebijakan UKM diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1995. Ada suatu hal yang menarik jika dibandingkan antara pertumbuhan

kesempatan kerja di UM dengan UK. Ternyata selama masa krisis (1997-1998) pertumbuhan negatif kesempatan kerja di UM tidak terlalu parah, secara total hanya 9,8 persen, sedangkan sektor yang paling terpuak adalah sektor keuangan, sewa dan jasa. Dalam bentuk kontribusi terhadap pembentukan PDB (atas harga berlaku), tahun 2006 UK menyumbang sekitar 40 persen, lebih besar bila dibanding tahun 1997 sebelum krisis, yang menyumbang hanya sekitar 38 persen saja.

Selain itu, UKM di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam hal penciptaan lapangan kerja. “Pada tahun 2000, lebih dari 66 juta orang bekerja di UK, atau sekitar 99,44% dari jumlah kesempatan kerja di Indonesia. UM pada tahun 1999 mempekerjakan 7,1 juta orang pada tahun 2000” (Tambunan 2002:22).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa UKM mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan. Akan tetapi, para pengusaha kecil dan menengah masih banyak mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya. Menurut Tambunan dalam Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (2002:69) mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah di Indonesia, seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi), keterbatasan informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi). Dengan kata lain, masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah bersifat multidimensi”.

Terkait dengan hal tersebut, UKM di Indonesia dewasa ini sedang dilanda kesulitan. Penyebabnya bukan saja tekanan eksternal tetapi juga faktor internal. Kendala faktor internal adalah kualitas SDM pengusaha kecil yang masih rendah yang dapat menimbulkan kendala-kendala lain yang lebih spesifik seperti: (1) kelemahan dalam memperoleh akses pasar dan memperbesar pangsa pasar; (2) kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan; (3) kelemahan di bidang organisasi dan manajemen; (4) keterbatasan dalam pemanfaatan peluang dan (5) keterbatasan jaringan usaha dan kerja sama usaha kemitraan. Sedangkan kendala eksternal meliputi: (1) iklim usaha yang kurang kondusif karena masih adanya persaingan

yang tidak sehat; (2) sarana dan prasarana perekonomian yang kurang memadai dan (3) pembinaan yang belum terpadu (Siswoyo dan Maryadi, 1995).

Strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan memberdayakan usaha itu. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran yang dimiliki serta mengembangkannya (Suprpto, 2002:187).

Pemberdayaan UKM, termasuk pula didalamnya pemberdayaan koperasi memang sangat penting dalam memperkuat struktur perekonomian pada umumnya dan struktur perekonomian daerah pada khususnya. Selain menyerap banyak tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar, UKM juga dapat dijadikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi kemajuan suatu daerah. Selain juga masih terdapat manfaat-manfaat lain yang didapatkan dari keberadaan UKM ini yang bisa menunjang pembangunan daerah. Suprpto (2002:188), mengungkapkan bahwa alasan-alasan yang mendukung pentingnya pemberdayaan UKM, yaitu:

1. Masalah fleksibilitas dan adaptabilitas didalam memperoleh bahan mentah dan peralatan;
2. Relevansinya dalam proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integrasi kegiatan pada sektor ekonomi lain;
3. Peranan dalam jangka panjang sebagai basis bagi mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena industri kecil ini umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah;
4. Potensi terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pengangguran.

Selain itu Triyuwono dan Yustika (2003:76) mengungkapkan bahwa keadaan yang diperlukan agar pemberdayaan UKM dapat dilaksanakan adalah:

1. Lingkungan non kompetitif;
2. Akses pendanaan;
3. Kompetensi teknis dan pengelolaan;

#### 4. Dasar hukum.

Triyuwono dan Yustika juga menjelaskan bahwa sangat disayangkan karena di Indonesia (dan seperti halnya di berbagai negara berkembang), keadaan tersebut belum sepenuhnya tercipta. Sampai saat ini masih ada begitu banyak permasalahan yang berhubungan dengan persaingan domestik, pendanaan, keterbatasan teknis serta belum adanya dasar hukum dan perundang-undangan.

Pemerintah juga telah berusaha mengurangi kendala-kendala yang ada pada UKM dengan melaksanakan berbagai alternatif usaha pembinaan untuk menumbuhkembangkannya. Adapun tiga bentuk pemberdayaan atau pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah berupa (1) penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya UKM. Kondisi tersebut diciptakan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada UKM untuk mengakses pasar, mengakses sumber pembiayaan dan mengakses teknologi. Peningkatan akses pasar dilakukan dengan memberikan proteksi. Bidang-bidang usaha kecil tertutup bagi usaha besar atau usaha besar yang memasuki usaha kecil tidak diberikan fasilitas sebesar yang diberikan kepada UKM. Peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Misalnya adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan perbankan untuk menyalurkan 20% kreditnya untuk usaha kecil. Akses teknologi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan UKM diharapkan dapat memperoleh berbagai informasi baru mengenai teknik produksi, (2) pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usaha ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui bentuk pelatihan seperti magang, inkubator bisnis, klinik usaha dan konsultasi usaha, (3) upaya pembinaan yang terakhir dilakukan dengan mengembangkan pola keterkaitan dan kemitraan. Pola ini pada dasarnya mengaitkan usaha kecil dan usaha besar. Usaha kecil diharapkan bisa menjadi pemasok atau sektor hulu maupun menjadi sektor hilir dari kegiatan usaha besar. Dalam perkembangannya pola ini berkembang menjadi pola bapak dan anak angkat (Tambunan, 2002).

Di Kabupaten Tulungagung sendiri, banyak terdapat UKM yang bergerak di berbagai bidang yang salah satunya adalah industri kerajinan marmer yang ada di Kecamatan Campurdarat. Pada Kecamatan ini, hampir semua desanya memiliki industri kerajinan marmer, tetapi yang paling banyak dijumpai adalah di Desa Campurdarat dan Desa Gamping. Industri kerajinan marmer merupakan salah satu hasil industri andalan di kota Tulungagung, sekaligus mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan dan diberdayakan karena selain mampu membuka lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja, industri kerajinan marmer juga mampu memberi cukup banyak manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, industri kerajinan marmer di Kabupaten Tulungagung mengalami banyak kesulitan sehingga dikhawatirkan banyak yang akan mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh melonjaknya ongkos produksi yang akhirnya menurunkan omset penjualan. Padahal, sebagaimana diketahui apabila industri ini dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan mampu memberikan keuntungan bagi produsen dan tenaga kerja. Oleh karena itu, agar memberikan kesejahteraan sosial bagi rakyat kecil, harus lebih diberdayakan lagi dengan strategi pengembangan yang berorientasi ekspor dan menggali lebih dalam lagi potensi sumber daya lokal yang tersedia guna menunjang pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi tugas bagi dinas-dinas terkait untuk memberikan alternatif penyelesaiannya.

Atas dasar uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih jauh, yang tertuang dalam Skripsi berjudul: **“Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Industri Kerajinan Marmer (Studi Kasus Di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada industri kerajinan marmer di desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak peningkatan hasil usaha sosial ekonomi dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada industri kerajinan marmer di desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada industri kerajinan marmer di desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada industri kerajinan marmer di desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak peningkatan hasil usaha sosial ekonomi dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada industri kerajinan marmer di desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) pada industri kerajinan marmer di desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa kontribusi antara lain:

a. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama;
2. Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya;
3. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

b. Kontribusi Praktis memiliki manfaat antara lain:

1. Sebagai masukan Kepada Pemerintah, dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengambil kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi industri terkait, yaitu industri kerajinan marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka memuat tentang pengertian-pengertian, uraian tentang teori yang digunakan dalam pembahasan tema penelitian ini. Diantaranya meliputi konsep dasar

pembangunan dan pemberdayaan, konsep dasar UKM dan sentra industri.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan dipergunakan, terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisa data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini yang dijelaskan adalah tentang hasil dan pembahasan, data disajikan secara sistematis disertai dengan analisa atas data yang telah disajikan tersebut.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran yang mendukung untuk peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Pembangunan

#### 2.1.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan menurut Suryono (2007:1) berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri, dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” juga mempunyai arti membuat, mendirikan, atau membina. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (anatomis), kehidupan (fisiologis), dan perilaku (*behavioral*). Lebih dari itu, kata “pembangunan” telah menjadi bahasa dunia, yaitu keinginan bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing yang kemudian melahirkan konsep pembangunan dan cara-cara (strategi) pencapaiannya.

Istilah pembangunan sangat populer dalam kehidupan bagi setiap negara, khususnya bagi negara sedang berkembang. Pembangunan selalu menjadi fokus utama dalam kegiatan negara dan menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan diberbagai aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bryant dan. White (1987:22) yang mendefinisikan pembangunan sebagai upaya, untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.

Bryant dan. White juga berpendapat bahwa ada 5 implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).

- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Menurut Siagian (1983:2), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan, bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian (1983:3) adalah:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses.
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan mengarah pada modernitas.
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional.

Konsep kunci paradigma pembangunan Indonesia Baru adalah pemberdayaan dengan mengakomodasi dua kepentingan yang *dualistic*, yaitu produktivitas dan demokrasi. Hal ini menurut Kartasmita (1996) berarti pembangunan menuntut keberhasilan dan kesuksesan di bidang ekonomi dengan tingkat pertumbuhan harus melampaui laju pertumbuhan penduduk sehingga kesejahteraan ekonomi dapat berkembang, tetapi tidak mengabaikan demokrasi yang berarti partisipasi aktif dan bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan.

Dari berbagai definisi pembangunan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha sadar, terencana, terorganisir, terarah serta berkelanjutan dengan membangkitkan kemampuan atau kapasitas manusia secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Model-Model Pembangunan

Menurut Korten (1984) menjelaskan bahwa asumsi dasar pembangunan yang berpusat pada rakyat itu menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar tetapi juga pada potensi manusia. Alasannya, karena menurut Chambers (1987) setiap manusia memiliki potensi dan daya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Selain itu suatu model pembangunan juga penting sebagai acuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Adapun model-model pembangunan antara lain:

#### 1. Model Pertumbuhan

Sebagian dari konsep pembangunan dirinci lebih jauh bahwa pertumbuhan merupakan konsep ilmu ekonomi. Menurut Thirwall (1974), pertumbuhan dinilai sebagai kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu menurut Todaro (1983), pendorong pertumbuhan ekonomi terdiri atas tiga faktor antara lain:

- a. Akumulasi modal, termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia.
- b. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitas.
- c. Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Akan tetapi, konsep-konsep pembangunan yang hanya berfokus pada ekonomi itu sempat dipermasalahkan. Menurut bidang sosial seperti pengangguran, dehumanisasi. Bryant dan White (1982) juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kemampuan jika tidak diikuti kemampuan dan ketahanan sosial.

#### 2. Model Modernisasi

Modernisasi merupakan istilah yang kini semakin *popular* (Beling, 1970), modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris (1760-1830) dan revolusi di Prancis (1789-1794). Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi itu berupa perubahan teknik industri dari cara tradisional ke modern yang berasal dari hasil penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan.

Dengan dasar tersebut dapat dijelaskan, bahwa proses modernisasi terdapat dimana-mana, baik di negara maju maupun negara berkembang. Modernitas diukur dari sejauh mana bangsa tersebut menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab. Modernisasi terkait dengan perubahan sosial, di satu pihak perubahan sikap masyarakat diperlukan sebagai prasyarat bagi kelancaran proses modernisasi dan lain pihak perubahan sosial merupakan produk proses modernisasi. Padahal, sebenarnya yang dimaksud modernisasi sebagai usaha mencapai taraf yang sama dengan yang ada di Barat, bukan meniru semua yang berasal dari Barat karena hal itulah yang dimaksud dengan westernisasi. Riggs (Beling, 1980) menyebutkan modernisasi merupakan usaha menandingi Barat. Konsep ini sekaligus membantah bila modernisasi sama dengan westernisasi atau menjadikannya seperti di Barat.

### 3. Model Pembaruan

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan lembaga-lembaga (*institutions*) masyarakat di dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk sikap dan pola perilaku kelompok.

#### 2.1.3 Konsep Paradigma Pembangunan

Dahulu negara berkembang disebut juga sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara terbelakang. Keterbelakangan negara-negara dunia ketiga yang kini menyebut dirinya negara berkembang itu menurut Szentes (1976) dapat dilihat dari lima segi yaitu:

- a. negara itu dianggap terbelakang karena keterbatasan sumber daya
- b. keterbelakangan dianggap sebagai keterlambatan dalam arti lingkaran setan static (*static vicious circle*) atau sistem dengan keseimbangan stabil semu (*quasi-stable equilibrium system*)
- c. hal ini dapat dipandang sebagai keterkaitan pada tradisi (*traditional society*)
- d. keterbelakangan dianggap sebagai kondisi yang bersifat historis akibat kesenjangan yang terjadi antara negara maju dengan negara yang belum maju.
- e. keterbelakangan dipandang sebagai akibat ketidakseimbangan dalam hubungan internasional

Selain itu, beberapa pakar seperti Horowitz, Todaro, Schoorl mengungkapkan karakteristik negara berkembang yang umumnya menyangkut bidang ekonomi dan sosial antara lain:

1. Tingkat kehidupan yang rendah ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, dan kurangnya pemerataan.
2. Makanan kurang yang didasarkan pada ukuran kalori. Seseorang disebut kekurangan makan apabila makanannya bergizi rendah, yaitu rata-rata kurang dari 2.500 kalori.
3. Struktur agraria lemah. Penduduk yang bekerja di bidang pertanian 55%-80%, sedangkan negara maju di bawah 20% bahkan ada yang hanya 5%. Data tersebut menunjukkan bahwa produksi sangat rendah dan gejala tersebut juga dikatakan sebagai gejala pertanian subsisten (*subsistence agriculture*).
4. Kurangnya integrasi nasional yang ditandai dengan ketidakstabilan politik.
5. Orientasi tradisional yang berarti orang sangat bergantung pada kekuatan alam secara langsung.

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa negara berkembang itu membutuhkan suatu kegiatan yang mampu menjadikan negara tersebut menjadi mandiri dan maju sehingga tidak kalah dengan negara lain yang sudah maju terlebih dahulu.

#### **2.1.4 Perkembangan Strategi Pembangunan**

Mengenai keterkaitan antara paradigma dan strategi dalam pembangunan, Suryono (2001:55) mengemukakan bahwa paradigma dan strategi pembangunan dikaitkan dengan masalah pembangunan, karena dalam setiap pembangunan diperlukan suatu paradigma dan strategi tertentu, agar nantinya pembangunan yang dilaksanakan bisa mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Paradigma dan strategi pembangunan tersebut antara lain:

##### **1) Strategi Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)**

Paradigma pertumbuhan merupakan konsep yang paling dominan digunakan oleh banyak negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya

terhadap negara maju. Dalam paradigma ini, pembangunan nasional identik dengan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan. Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu. Suryono (2001:55) menyatakan bahwa peningkatan ekonomi yang menggunakan pendekatan pertumbuhan, dititikberatkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan yang dimaksud salah satunya diukur dengan pendapatan perkapita.

Sementara itu, menurut Mubyarto (1997:173) dalam paradigma pertumbuhan melalui pemerataan ini, pemerintah dalam melaksanakan strategi pembangunan ekonomi tidak ragu-ragu untuk senantiasa memihak pada kepentingan masyarakat miskin dan lemah, agar mereka memperoleh dan memanfaatkan peluang untuk berusaha secara produktif, dan pada gilirannya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengalaman menunjukkan bahwa penerapan pembangunan di beberapa negara berkembang telah mengabaikan masalah pemerataan (distribusi) hasil pembangunan. Akibatnya, masih banyak kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya menggunakan strategi pertumbuhan ekonomi, tetapi bergeser pada strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

## 2) Strategi Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan (*Growth Andequity Of Strategic Development*)

Suprpto (2000:78) menyatakan bahwa paradigma pembangunan dengan konsep pemerataan lebih diarahkan pada paradigma *welfare state* dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang diukur melalui pemerataan pendapatan.

Sementara itu, menurut Mubyarto (1997:173) dalam paradigma pertumbuhan melalui pemerataan ini, pemerintah dalam melaksanakan strategi pembangunan ekonomi tidak ragu-ragu untuk senantiasa memihak pada kepentingan masyarakat miskin dan lemah, agar mereka memperoleh dan memanfaatkan peluang untuk berusaha secara produktif, dan pada gilirannya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengalaman menunjukkan bahwa penerapan pembangunan di beberapa negara berkembang telah mengabaikan masalah pemerataan (distribusi) hasil pembangunan, akibatnya masih banyak kemiskinan, penangguran dan ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya menggunakan strategi pertumbuhan ekonomi, tetapi bergeser pada strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

### 3) Strategi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan menbangkitkan kemampuan untuk membangun secara adil dan merata tanpa merusak lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi dapat terus menerus tumbuh tanpa batas.

Berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, menurut Cernea dalam Tjokrowinoto (2002:12) ada dua interpretasi konsep *sustainable*, yaitu:

“Pertama kali lahir dari peikiran kaum *enviromentalist* yang menekankan perhatian pada “*world system*” atau planet bumi dan menghendaki adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan dalam proses pembangunannya memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan kelangsungan “*world system*”. Sedangkan interpretasi kedua datang dari para pakar donor agencies yang menekankan perlunya interaksi antara manusia dan proyek, memperhatikan *project sustainability*”.

Strategi pembangunan ini didasarkan pada masalah yang menjadi perhatian khusus dari negara-negara berkembang, yaitu penambahan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, partisipasi masyarakat, organisasi sosial politik, kerusakan lingkungan dan pembangunan masyarakat pedesaan (Suryono, 2001:57).

### 4) Strategi Pembangunan Dengan Konsep Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep *empowerment* (pemberdayaan), tahun 1992, muncul ke permukaan karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan yang ditawarkan disini adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui strategi:

- 1) Pemberdayaan usaha kegiatan ekonomi produksi yang berbasis nilai-nilai dan potensi lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 2) Pengkaitan usaha ekonomi pedesaan dengan kegiatan ekonomi yang lebih luas melalui pemanfaatan pusat-pusat pertumbuhan (khususnya kawasan perkotaan) sehingga dapat dicapai manfaat yang saling mendukung, bukannya desa dieksploitasi oleh kota.
- 3) Pemberdayaan prasarana seperti jalan, air bersih, pasar dan jaringan listrik.
- 4) Penguatan daya institusional (interaksi antar individu dan individu dengan lingkungan sosial dan fisik) untuk menghindari penyedotan sumber daya desa oleh unsur-unsur luar desa, sehingga pengembangan kegiatan usaha pedesaan menjadi tidak *sustainable*.

Menurut Friedmann dalam Mardalena dan Yohanes (1998:1), konsep *empowerment* merupakan suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi langsung (melalui partisipasi), demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Selanjutnya Friedmann menjelaskan bahwa titik fokusnya adalah lokalitas, sebab *civil society* akan merasakan siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.

## **2.2 Peranan Pemerintah**

### **2.2.1 Pengertian Peranan**

Terdapat beberapa definisi dan pengertian dari peranan, diantaranya menurut Daryanto dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (1997:487), pengertian peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peran berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat, dimana di dalamnya termaktub bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Sukanto (1990:39) mendefinisikan peranan sebagai berikut:

“Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Berbagai macam definisi dan pengertian peranan tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa peranan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan ketentuan yang telah digariskan padanya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya.

### **2.2.2 Pengertian Peranan Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparaturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan

pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Siagian (1984:194-202) menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu:

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku Dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Berkaitan dengan Pemerintah Daerah, Arsyad (1999:120) mengemukakan bahwa terdapat empat peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah dalam proses pembangunan, yaitu:

- a. Sebagai *Entrepreneur*, bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

- b. Sebagai Koordinator, bahwa pemerintahan daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pemerintahan daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Selain itu juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
- c. Sebagai Fasilitator, bahwa pemerintahan daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
- d. Sebagai *Stimulator*, bahwa pemerintahan daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Stimulasi ini berupa: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk industri, membantu industri kecil untuk melakukan pameran.

Berkaitan dengan pengertian peranan, maka peranan yang dimiliki pemerintah adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban kepada negara dan masyarakat yang harus dilakukan sesuai dengan peranan atau status kedudukannya, baik itu sebagai pembuat kebijakan, pembuat strategi maupun pelaksana program dan proyek sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan.

### 2.2.3 Model Peranan Pemerintah

Model peranan pemerintah yang paling lama dan paling banyak dianut oleh berbagai negara didunia , terutama negara berkembang menggunakan *model traditional bureaucratic authority*. Ciri model ini adalah pemerintahan daerah bergerak dalam kombinasi tiga faktor, *pertama* penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (*strong public sector*). *Kedua*,

peranan pemerintah daerah sangat kuat (*strong local government*) karena memiliki cakupan fungsi yang luas, model operasi yang bersifat mengarah, derajat otonomi yang sangat tinggi, dan tingkat kendali eksternal yang rendah. *Ketiga*, Pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Leach, Stewart, & Walsh (1994) dalam (Muluk, 2006) mengungkapkan suatu alternatif perubahan dari model *traditional bureaucratic authority* tersebut menuju tiga model alternatif yang dinilai lebih ideal, yaitu:

1. *The residual enabling authority* menggabungkan penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang lemah dan berdiri diatas bentuk demokrasi yang netral, baik terhadap bentuk *representative democracy* maupun *participatory democracy*.
2. *The Market-oriented enabling authority* merupakan kombinasi dari penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang kuat disertai penekanan pada demokrasi partisipatif. Seperti halnya dengan *residual authority*, model ini mengutamakan pasar dalam urusan pemerintah daerah, namun berbeda dalam *starting-pointnya*. Pemerintah mempunyai peran yang kuat dan aktif dalam menentukan masa depan perekonomian di wilayahnya.
3. *The community-oriented authority* merupakan gabungan dari penekanan pada demokrasi partisipatif yang kuat, atau setidaknya ada di posisi tengah dalam hubungan dengan *weak or strong local governance*, serta penekanan antara sektor publik dan pasar.

Dari ketiga peranan pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah menggabungkan dan mengkombinasikan antara partisipasi dengan *strong market*. Oleh karena itu partisipasi aktif dari pemerintah sangat penting untuk menentukan masa depan perekonomian di suatu wilayah.

#### **2.2.4 Peranan Pemerintah Terhadap Industri Kecil**

Peran serta pemerintah dalam membina dan mengembangkan industri kecil sangatlah diperlukan agar usaha industri ini dapat berkembang dengan pesat. Peranan ini ditujukan agar sektor ini dapat berperan sebagai sumber penghasilan

yang cukup bagi pemilik usaha dan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya, karena jika dalam hal tersebut dapat ditangani dengan sungguh-sungguh usaha industri ini dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mengembang potensi yang ada di daerahnya terutama dalam hal mengembangkan industri kecil yang membawa pengaruh yang besar untuk perekonomian daerah Tulungagung itu sendiri. Dalam bukunya Tambunan (2002:146) dikatakan peranan pemerintah daerah pada tingkat propinsi maupun distrik secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM oleh pemerintah pusat
2. Formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan.
3. Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial, pendidikan dan pelatihan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUKM
5. Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Dari kelima peranan pemerintah yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan terhadap industri kerajinan marmer membutuhkan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat. Dari sini akan terlihat bahwa peranan pemerintah yang dibutuhkan oleh industri kecil sangat penting guna meningkatkan kemajuan daerah.

## **2.3 Konsep Pemberdayaan**

### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Prijono dan Pranarka (1996:34), menjelaskan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat negara regional, internasional

maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi, dan lain-lain.

Kartasasmitha (1996), mengatakan bahwa ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Upaya ini harus terarah (*targeted*). Secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri, masyarakat sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanggulangannya dilakukan secara individu.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UKM merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi UKM serta berusaha untuk mengembangkannya. Partisipasi aktif pelaku UKM harus dibangkitkan supaya mereka menjadi pelaku utama dari suatu program pemberdayaan (menciptakan kemandirian pada pelaku UKM).

### **2.3.2 Indikator Pemberdayaan**

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif dalam Suharto (1997:215). Parson. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang rumah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang rumah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai prinsip pemberdayaan dan indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Prinsip pemberdayaan Suharto (1997:216-217):

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.
4. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis, Suharto (2005:63). Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: “kekuasaan didalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).

### 2.3.3 Tahapan Pemberdayaan

Agar upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemberdayaan perlu mempergunakan tiga tahapan, yaitu penyiapan (bagi yang hendak diperdayakan), pemihakan (terhadap yang diperdayakan), dan perlindungan (bagi yang sudah mandiri). Kartasmita (1996:74) menambahkan upaya pemberdayaan dapat

melalui tiga arah, antara lain:

1. Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah usaha untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketiga arah pemberdayaan di atas berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan
2. Untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. (Sumodiningrat, 1996)

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar. Hal ini terkait pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat.

Untuk sampai pada ketiga sasaran di atas maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui salah tiga tahapan (Priyono dan Pranarka, 1996:2), yaitu:

1. Inisial, yaitu pemberdayaan dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat
2. Partisipatoris, pemberdayaan dari pemerintah bersama masyarakat, dan untuk rakyat
3. Emansipatoris, pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah

Pada tahap ketiga ini, masyarakat sudah dapat menemukan eksistensi dirinya, sehingga dapat melakukan pembaruan-pembaruan dalam mengaktualisasikan diri atau emansipatoris, kegiatan pemberdayaan masyarakat telah mencapai puncaknya dan untuk merealisasikannya diperlukan dua persyaratan pokok, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan, dimana perencanaan pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat adalah yang mengarah pada strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, dan strategi ini memiliki tiga arah (Sumodiningrat, 1996), yaitu:
  - a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
  - b. Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat
  - c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budidaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.
2. Pelaksanaan program pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat memiliki ciri antara lain:
  - a. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat lemah
  - b. Pelaksanaan harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan
  - c. Karena masyarakat lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri, akibatnya kekurangan keberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (*cooperative*) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.

Mengerahkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota masyarakat yang mampu lainnya, organisasi masyarakat termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya. (Kartasmita, 1996).

#### **2.3.4 Strategi Pemberdayaan**

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode ini diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan

pemberdayaan.

Strategi pemberdayaan secara konseptual menurut Balai Besar PMD (2005:59), antara lain:

a. Pendekatan Kelompok

Secara ekonomi, sosial, budaya dan politik yang ada di masyarakat khususnya pedesaan dewasa ini masih sangat rendah atau lemah. Hal ini akan sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara sendiri, karena itu pendekatan kelompok adalah strategi yang paling efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan masyarakat dimana pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar yang kuat dan seimbang.

b. Penguatan Kelembagaan

Strategi ini pada dasarnya dilaksanakan karena terdapat asumsi bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk manajemen masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan kegiatan. Dengan memfungsikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan melalui berbagai input pembinaan dan arahan diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat baik secara individual maupun kelompok. Disini lain akan terjadi proses pembelajaran dengan mengorganisir kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar berhasil secara optimal (*social learning*).

c. Pendampingan

Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri. Adapun tugas pendamping meliputi, menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM merupakan upaya untuk mengembangkan

sumber daya insani masyarakat baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan maupun kinerja mereka. Implementasi pengembangan SDM yaitu diharapkan adanya program-program kegiatan yang bersifat pendidikan dan latihan secara sistematis.

e. Pemberian Stimulan

Stimulan diberikan biasanya berupa dana hibah baik hibah murni maupun bergulir (*revolving fund*). Dengan strategi ini diharapkan ketersediaan masyarakat untuk melakukan swadaya sesuai dengan kemampuan serta mempersiapkan masyarakat secara teknis baik administratif maupun *skill*.

Menurut Elliot (1987) dalam Pranarka dan Prijono (1996:13), didalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, melalui:

1. *The Welfare Approach*. Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan sentrum of power, yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.
2. *The Development Approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. *The Empowerment Approach*. Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Dari keterangan teori diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan sangat penting untuk digunakan sebagai cara untuk membangun kemandirian masyarakat yang berawal dari kepercayaan diri yang mereka miliki. Kegiatan-kegiatan dalam melakukan pemberdayaan dibutuhkan untuk melakukan pendampingan dan pemberian *stimulus* untuk membangkitkan semangat masyarakat agar lebih maju.

### 2.3.5 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

#### 2.3.5.1 Pengertian UKM

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas mengenai konsep pemberdayaan, berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat beberapa pengertian

dari pemberdayaan usaha kecil dan menengah antara lain:

- a. Menurut SK Memperindag No. 589/MPP/Kcp/10/1999. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan Usaha Menengah memiliki definisi sebagai kegiatan usaha dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Menurut Inpres No. 10 Tahun 1999. Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan dibawah Rp. 10.000.000.000,- sedangkan diatas itu sudah termasuk industri besar.
- c. Menurut Bank Indonesia. Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150.000.000,- dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600.000.000,-.
- d. Menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki aset Rp. 200.000.000,- diluar tanah dan bangunan, serta memiliki omset Rp. 1.000.000.000,- per tahun.
- e. Menurut BPS. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki pekerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang.

Usaha kecil merupakan usaha yang mayoritas dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena usaha kecil dan menengah tidak memerlukan persyaratan khusus, teknologi yang digunakan relatif sederhana dan kebutuhan dana menengah ini, maka diperlukan adanya suatu upaya pemberdayaan.

Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada Bab 1 pasal 1 (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan usaha kecil adalah, “Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan serta pembiayaan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Yang dimaksud dengan iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian dan perlindungan. Kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang

seluas-luasnya (pasal 1 ayat 4). Iklim usaha yang ditumbuhkan pemerintah sebagai objek yang diberdayakan meliputi aspek-aspek pendanaan, persaingan, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui kemampuan bimbingan dan bantuan usaha kecil (pasal 5 ayat 1). Untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil, hal yang harus dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi (pasal 14).

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan *non bank* atau lembaga-lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil (pasal 1 ayat 6). Pembiayaan usaha kecil yang disediakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat meliputi kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan *non bank*, modal ventura, pinjaman dan penyisihan laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain (pasal 21).

Selanjutnya tujuan pemberdayaan usaha kecil yang termuat pada pasal 14 adalah:

1. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. meningkatkan peran serta usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan usaha kecil sebagai sendi utama dalam memperkokoh perekonomian nasional.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan nilai yang sesuai dengan standar yang ditentukan dan memiliki beberapa pekerja didalamnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat kecil untuk mengembangkan potensi diri sehingga mampu memberikan kontribusi penting kepada pemerintah.

### 2.3.5.2 Karakteristik UKM

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002), karakteristik UKM secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan yang standar, kadang kala pembukuan tidak di *up to date*, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik UKM sangat penting untuk mengetahui sejauh mana usaha yang dijalankan oleh masyarakat itu mampu dan pantas untuk dikembangkan. Oleh karena itu sebelum melakukan pemberdayaan perlu diketahui bagaimana karakteristik atau ciri khas yang dimiliki UKM yang bersangkutan.

### 2.3.5.3 Peranan UKM

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil diuraikan bahwa usaha kecil mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan melalui usaha kecil dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat, mewujudkan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional, khususnya di bidang ekonomi.

Begitu pentingnya peranan usaha kecil ini sehingga perlu diberikan perlindungan dan pembinaan khusus yang tidak diberikan kepada usaha menengah dan usaha besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Dalam rangka perlindungan dan pembinaan usaha kecil tersebut menteri tenaga kerja juga telah menanggapinya dengan menetapkan pembinaan usaha kecil, termasuk koperasi sebagai program utama mengatasi pengangguran.

Menurut hasil survei Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) bahwa *asset* 300 (tiga ratus) konglomerat Indonesia mencapai 227,3 Trilyun, yaitu hampir 70% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sekitar 200 (dua ratus) konglomerat Indonesia menguasai lebih kurang 80% kehidupan ekonomi dan jumlah uang yang beredar di Indonesia, sedangkan usaha kecil hanya menyumbang 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lemahnya posisi usaha kecil ini dapat disebabkan oleh faktor *ekstern* berupa iklim usaha yang kurang persaingan tidak sehat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan lemahnya pembinaan. Faktor *intern* adalah kelemahan di bidang pemasaran, permodalan, penguasaan teknologi, manajemen, dan kemitraan.

#### 2.3.5.4 Kelebihan dan Kelemahan UKM

Kelebihan dan daya tarik yang dimiliki UKM dalam (Thoha, 2000:28) antara lain:

- 1) Pemilik merangkap manager perusahaan dan menjalankan semua fungsi manajerial seperti marketing, finansial dan administrasi.
- 2) Dalam pengelolaannya tidak memerlukan keahlian manajerial yang handal.
- 3) Sebagian besar membuat lapangan kerja baru, inovasi sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru.
- 4) Resiko menjadi beban pemilik.
- 5) Bebas menentukan harga produksi barang dan jasa.
- 6) Prosedur hukumnya sederhana.
- 7) Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajak adalah pribadi atau pengusaha bukan perusahaan.
- 8) Mudah dalam proses pendirian.

- 9) Mudah dibubarkan.
- 10) Pemilik mengelola secara mandiri serta bebas waktu.
- 11) Pemilik menerima seluruh laba.
- 12) Umumnya mempunyai kemampuan *survive*.
- 13) Diversifikasi terbuka luas, sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa terjadi melalui kreativitas pengelola.
- 14) Tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya tidak terlalu mahal.
- 15) Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya.

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002), kelebihan yang dimiliki oleh usaha kecil dibandingkan sektor usaha lain adalah:

- 1) Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai ragam bentuk usaha. Hal ini karena banyak usaha kecil timbul untuk memenuhi permintaan (*agregate demand*) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa jadi orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas hanya pada orientasi produk, melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Untuk itu diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian tinggi. Dengan penyebaran usaha kecil yang cukup luas, berarti masalah urbanisasi dan kesenjangan sosial antara desa dengan kota dapat ditekan. Setidak-tidaknya hal ini dapat mengurangi konsentrasi intensitas lapangan kerja pada daerah tertentu yang akan menimbulkan efek urbanisasi serta masalah sosial lainnya.
- 2) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, implikasinya usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk keluar masuk pasar. Dengan demikian kegiatan produksi dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya aktiva tetap adalah mudah meng-*up to date*-kan produknya, sebagai akibatnya akan memiliki derajat

imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.

- 3) Sebagian besar usaha kecil dikatakan padat karya (*labor intencive*) yang disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana. Persentase distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian, distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu, keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yaang erat antara pemilik dengan karyawan sehingga mengurangi terjadinya PHK. Hal ini menunjukkan bahwa betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi yang tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kelebihan UKM itu dapat memberikan keuntungan untuk pemilik usaha karena selain sebagai pengelola usaha, pemilik bisa sekaligus mengatur sistem manajemen dalam rangka meningkatkan kemandirian. Selain itu pemilik usaha juga mampu memberikan inovasi sendiri untuk meningkatkan kemajuan usahanya.

Menurut Thohar (2000:28), kelemahan UKM dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern antara lain:

- 1) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak memenuhi ketentuan pembukuan yang standar.
- 2) Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan bekerja tidak sesuai dengan jam kerja standar.
- 3) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja, karena tidak ada perencanaan kas.
- 4) Persediaan barang terlalu banyak, sehingga beberapa jenis barang menjadi kurang laku.
- 5) Sering terjadi *miss management* dan ketidakpedulian pengelolaan prinsip-prinsip manajerial.
- 6) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada, atau belum dirumuskan.

Selain kelemahan-kelemahan di atas, masih terdapat kelemahan lain yang ada pada usaha kecil, yaitu (Yustika, 2003:115-116):

- 1) Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana.
- 2) Struktur organisasi bersifat sederhana
- 3) Jumlah, tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.

- 4) Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
- 5) Sistem akuntansi kurang baik, bahkan tidak memiliki sama sekali.
- 6) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
- 7) Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
- 8) Margin keuntungan sangat tipis.

Keseluruhan unsur mengenai kelemahan UKM dapat disimpulkan bahwa dengan modal yang berasal dari hutang, maka menyebabkan pemilik usaha memiliki beban untuk mengembalikannya karena usaha yang dimiliki tidak selalu berjalan mulus. Permasalahan sistem manajemen yang masih sederhana juga menyebabkan UKM mendapat keuntungan yang tidak sesuai dan menjadi kesulitan untuk bersaing di tingkat internasional.

#### 2.3.5.5 Masalah-Masalah UKM

Menurut Wuri dalam Suseno, Sulistyowati dan Desembriarto (2005:46), terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UKM, dalam mengembangkan usahanya yang terbagi dalam masalah internal dan masalah eksternal. Masalah Internal meliputi:

- a. Keterbatasan modal kerja, termasuk untuk investasi
- b. Kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau
- c. Keterbatasan teknologi, karena sebagian besar UKM masih menggunakan mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual
- d. Keterbatasan SDM dengan kualitas baik, karena sebagian besar pengusaha, UKM masih lulusan pendidikan primer.
- e. Kesulitan dalam pemasaran, karena kualitas produk dan kegiatan promosi masih kurang sehingga ada persaingan dari produk-produk sejenis, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.
- f. Ketidaksiapan UKM sendiri, karena UKM tidak mempunyai pengetahuan tentang pasar dan jaringan pemasaran sehingga sering UKM tergantung pada para tengkulak

- g. Desain untuk produk-produk UKM banyak yang sudah tidak sesuai lagi/tidak diminati oleh konsumen modern di perkotaan maupun konsumen internasional.
- h. Pelaku UKM mengeluhkan sulitnya pencairan dana bergulir yang dibutuhkan guna mengatasi kenaikan, harga BBM akhir-akhir ini.

Selanjutnya terdapat masalah eksternal yang meliputi:

- a. UKM tidak dapat memperluas usaha karena keterbatasan akses pada sumber permodalan karena semua bank termasuk lembaga perkreditan yang khusus untuk UKM mensyaratkan adanya agunan.
- b. Adanya distorsi pasar, hak istimewa banyak diberikan pada perusahaan-perusahaan besar, misalnya kemudahan kredit, lisensi bisnis keringanan pajak dan penciptaan regulasi yang kondusif
- c. Adanya aturan-aturan yang kontradiktif dengan upaya pengembangan UKM, misalnya lahir perda-perda untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah.
- d. Suku bunga masih relatif tinggi. Dengan masih tingginya suku bunga, UKM akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber pendanaan karena keuntungan yang diperoleh masih dibawah rata-rata.

Pada umumnya sumber-sumber pembiayaan UKM berasal dari modal sendiri atau sumber informal. Sumber permodalan ini tidak cukup untuk memenuhi kegiatan produksi apalagi untuk investasi. Macetnya sistem perbankan terhadap pengucuran kredit skala mikro juga menjadi kendala bagi UKM. Kesulitan ini terjadi karena pihak perbankan semakin ketat mengendalikan kredit karena kepentingan standarisasi yang mengacu pada pola perbankan di dunia misalnya dengan ditetapkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kesulitan yang dialami perbankan telah mempersulit UKM untuk berkembang lebih cepat (Karseno, 2005).

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan salah satu kendala yang cukup kritis bagi banyak UKM, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, desain rekayasa, pengendalian kualitas, organisasi bisnis akuntansi, pengolahan data, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan

untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru (Tambunan, 2002).

Secara umum UKM juga memiliki keterbatasan pada ketersediaan prasarana dan infrastruktur yang kurang memadai. Skala ekonomi yang relatif kecil dari UKM ini menyulitkan untuk menggunakan teknologi hemat biaya yang pada umumnya dimanfaatkan oleh perusahaan dengan skala besar. Keterbatasan ini mendorong UKM untuk lebih berorientasi pada inovasi dan kreativitas dalam produksi.

#### 2.3.5.6 Peluang dan Tantangan UKM di Daerah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UKM di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang berpengaruh terhadap iklim persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pengusaha UKM dituntut untuk dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan, yang tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi, dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sedangkan di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pengusaha-pengusaha UKM di daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan bisnis. Dengan kata lain, tantangan yang pasti dihadapi setiap pengusaha UKM di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Pemanfaatan kesempatan yang dimaksud misalnya dalam bentuk:

- a. Bagaimana mereka dapat meningkatkan laju pertumbuhan usaha mereka atau menciptakan bisnis-bisnis baru berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki daerah mereka dan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

- b. Bagaimana mereka dapat menguasai pasar lokal atau menembus pasar di daerah lain.
- c. Bagaimana mereka dapat menarik investor dari luar untuk menanamkan modal di daerahnya.
- d. Sejauh mana kesiapan mereka untuk dapat bermitra (*strategic alliance*) dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di daerahnya.
- e. Bagaimana pengusaha UKM setempat dapat bermitra dengan pengusaha di daerah lain untuk meningkatkan perdagangan antardaerah.
- f. Bagaimana pengusaha UKM di daerah dapat menarik proyek-proyek besar dari pemerintah untuk dibangun di daerah mereka.

Kalla dalam Tambunan (2002) mengatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara umum pengusaha di daerah akan:

- a. Bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak perlu berurusan dengan banyak birokrasi di Jakarta. Ini artinya, salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah kesempatan peningkatan efisiensi usaha di daerah. Sekarang, tantangan bagi setiap pelaku bisnis di daerah adalah bagaimana mereka dapat mewujudkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.
- b. Tata niaga nasional pasti tidak ada lagi dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tata-niaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha di daerah akan hilang, yang selanjutnya dapat meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha UKM di daerah: bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hilangnya distorsi tersebut.
- c. Mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat. Ini artinya pengusaha-pengusaha UKM di daerah dapat bersaing di pasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pihak ketiga, yakni pemerintah pusat) dan *fair* dengan pengusaha-pengusaha dari luar daerah. Dalam hal ini, tantangan bagi setiap pengusaha UKM di daerah adalah bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka, paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar agar *competition capability*

antara pengusaha daerah dengan pengusaha dari luar daerah menjadi sama.

- d. Mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya. Tantangan bagi setiap pengusaha di daerah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat maupun dari badan-badan dunia seperti ADB (*Asian Development Bank*) atau Bank Dunia.
- e. Kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap UKM di daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dari usaha pemanfaatan yang dilakukan tersebut, maka pengusaha UKM akan mampu meningkatkan penghasilan dalam bersaing sampai pada tingkat internasional. Hal ini otomatis juga akan memberikan kesan positif terhadap hasil alam Indonesia yang mampu dibentuk sebagai hasil produksi yang indah dan bermanfaat sehingga menarik investor asing untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia dengan kebijakan ekonomi yang dimiliki oleh Negara.

#### 2.3.5.7 Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM

Tujuan dari pembinaan UKM adalah untuk memperluas kesempatan berusaha dalam meningkatkan pendapatan. Adapun usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing UKM menurut Partomo dan Soejoedono, (2002:29) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah berupaya secara terus-menerus melaksanakan *deregulasi* dan *debirokratisasi*. Kebijakan ini bertujuan agar dunia usaha benar-benar mampu untuk mengembangkan usahanya.
2. Penataan dan pemantapan kelembagaan dimaksudkan untuk mempermudah pembentukan jaringan usaha dan mempermudah distribusi, sehingga tercapai efisiensi. Dunia usaha juga terus-menerus melakukan tindakan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, produktivitas, kualitas dan pengelolaan manajemen secara profesional.

3. Penelitian dan pengembangan, serta peningkatan daya saing harus didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu penting bagi dunia usaha dalam mengembangkan usahanya perlu menerapkan teknologi tepat guna, sehingga mampu menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan mampu bersaing di pasaran.

Sedangkan Wibisono dalam Suseno, Sulistyowati dan Desembriarto (2005:47-48), berpendapat bahwa untuk dapat meningkatkan daya saing UKM, dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain dengan *klustering*, kemitraan, dan aliansi strategis. *Klustering* adalah unit-unit usaha UKM mengumpul di suatu lokasi tertentu berdasarkan kesamaan geografis atau sektor ekonomi. Hal ini membuat UKM mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki daya saing menyebar. Peran pemerintah yang diharapkan adalah bagaimana memunculkan keunggulan lokasi dan sektor ekonomi yang dimiliki setiap daerahnya.

Selain *klustering*, bisa juga dilakukan melalui kemitraan. Kemitraan usaha adalah hubungan kerja sama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar. Peran pemerintah yang diharapkan adalah menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya pola kemitraan yang sehat.

Upaya yang lain adalah dibutuhkan aliansi strategis yang merupakan kunci keberhasilan untuk menembus pasar yang lebih luas. Disini peran pemerintah diharapkan mampu menjadi media atau tempat bertemunya kepentingan UKM dan *partner* strategisnya. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing UKM tidak lain membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pengusaha UKM sendiri didukung dengan penyesuaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini untuk mampu berkembang lebih luas lagi.

#### 2.3.5.8 Strategi Pengembangan UKM

Berdasarkan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) tanggal 8 Juni 2005, maka strategi pengembangan UKM melibatkan dua pihak:

Pertama: Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan
2. Mendorong pemerintah dalam penerbitan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan
3. Mendorong upaya penggalangan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk membiayai pemberdayaan dan pengembangan UKM
4. Mendorong terwujudnya kepastian hukum, penguatan, keberadaan, dan pendayagunaan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) untuk mendukung pengembangan usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan
5. Mendorong upaya pembentukan lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyedia sumber permodalan yang murah bagi usaha mikro
6. Mendorong penyediaan dana penjaminan dari pemerintah untuk UKM terutama di pedesaan dan sektor pertanian
7. Mendorong penguatan lembaga penjaminan kredit untuk UKM
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan bagi UKM
9. Mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan usaha mikro (kelompok masyarakat pasca program penanggulangan kemiskinan).

Kedua: Gubernur Bank Indonesia

1. Mendorong Bank Umum dan BPR, baik konvensional maupun Syariah untuk menyalurkan kredit UKM sesuai dengan rencana bisnis masing-masing bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit UKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.
3. Menyediakan informasi atas pemantauan penyaluran kredit UKM Bank Umum serta BPR baik konvensional maupun Syariah setiap 3 bulan.

4. Memberikan pelatihan kepada bank dan *Business Development service* provider (BDSP) dalam rangka peningkatan penguatan kelembagaan, yang dapat mendorong penyaluran kredit UKM.
5. Menyediakan hasil informasi hasil penelitian dalam rangka pengembangan UKM, khususnya penelitian potensi dasar ekonomi daerah/ BLS (*Baselin Economic Survey*) dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank (*lending model*).
6. Menyediakan informasi sektor/ subsektor unggulan untuk pengembangan usaha kecil melalui Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) dengan alamat website <http://www.bi.go.id>.
7. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai pengembangan UKM atas dasar penelitian atau pengkajian.
8. Mendukung program pemerintah dalam pembahasan dan percepatan rancangan UU mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Penjaminan Kredit untuk UKM dan UU mengenai UKM.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pendampingan BDSP/ Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi UKM.
10. Memfasilitasi atau bekerjasama dengan lembaga lain, baik domestik maupun internasional, dalam rangka mendorong penyaluran kredit UKM.

Melihat uraian di atas dapat diketahui bahwa strategi pengembangan UKM itu membutuhkan peranan aktif dari pemerintah dalam segi permodalan hingga pemasaran untuk mencapai target yang memuaskan dan maksimal untuk tetap bertahan menghadapi pengaruh global yang terjadi di dunia industri dan perdagangan. Oleh karena itu peran serta pemerintah sangat penting untuk memajukan UKM pada suatu wilayah.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

#### 4.1.1 Kondisi Geografis

Tulungagung merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Tulungagung terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Tulungagung memiliki motto Bersinar (Bersih, Indah dan Menarik) dan diberi sebutan Kota Ingandaya. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak pada:

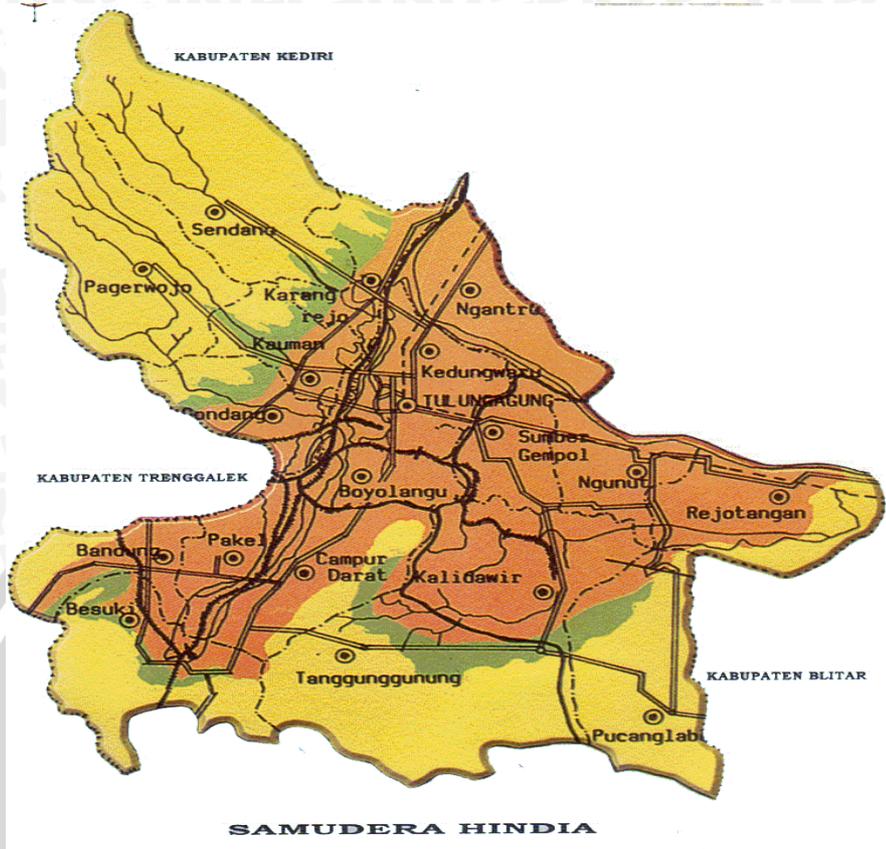
- 112°43' - 112°07' Bujur Timur
- 7° 51' - 8° 18' Lintang Selatan

#### 4.1.2 Topografi

Sekitar 13,35% dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang mempunyai ketinggian 85m dpl. Keadaan topografi dari wilayah ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi sebagai berikut:

1. Ketinggian 0 – 100 m dpl ± 39.508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir disemua kecamatan.
2. Ketinggian 100 – 500 m dpl ± 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat pada kecamatan Gondang, Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban, dan Boyolangu.
3. Ketinggian 500 – 1000 m dpl meliputi wilayah seluas ± 9.325,00 ha atau 8,24 dari luas wilayah kabupaten terdapat di kecamatan Pagerwojo dan kecamatan Sendang.

Ketinggian lebih dari 1000 m dpl ± 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah Kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Sendang.



Gambar 1: Peta Kabupaten Tulungagung

Tabel 4.1: Penduduk Tulungagung Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
010 Besuki	18.002	17.939	35.941
020 Bandung	24.230	23.107	47.337
030 Pakel	25.518	25.649	51.167
040 Campurdarat	27.380	26.848	54.228
050 Tanggunggunung	12.325	12.611	24.936
060 Kalidawir	33.963	34.151	68.114
070 Pucanglaban	12.656	13.364	26.020
080 Rejotangan	36.865	36.925	73.790
090 Ngunut	38.045	38.969	77.014
100 Sumbergempol	32.109	32.184	64.293
110 Boyolangu	37.206	36.631	73.837
120 Tulungagung	33.355	34.392	67.747
130 Kedungwaru	42.842	41.878	84.720
140 Ngantru	27.242	26.748	53.990
150 Karangrejo	19.313	19.955	39.268
160 Kauman	25.038	25.910	50.948
170 Gondang	27.373	27.694	55.067
180 Pagerwojo	14.885	15.175	30.060
190 Sendang	22.866	23.691	46.557

<b>Jumlah/Total: 2008</b>	<b>511.213</b>	<b>513.821</b>	<b>1.025.034</b>
<b>2007</b>	<b>508.523</b>	<b>511.694</b>	<b>1.020.217</b>
<b>2006</b>	<b>498.533</b>	<b>504.274</b>	<b>1.002.807</b>
<b>2005</b>	<b>495.365</b>	<b>501.597</b>	<b>996.962</b>
<b>2004</b>	<b>491.691</b>	<b>498.165</b>	<b>989.852</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2008 jumlah penduduk Tulungagung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebesar 3,5 %. Pada tahun 2008 jumlah antara penduduk laki-laki 511.213 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 513.821 jiwa. Terlihat belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari besarnya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar Kecamatan. Adapun Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Kedungwaru, sedangkan Kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung.

## **4.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung**

### **4.2.1 Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 4, Tepatnya 2 km kearah selatan dari pusat kota Kabupaten Tulungagung. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung bernama Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan yang sangat besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 11 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, kedudukan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tidak seperti di daerah-daerah lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tidak bergabung dengan koperasi. Dengan diberlakukannya UU No 32 th 2004 tentang Otonomi Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Mulai 1 Juli 2009 dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 26 Tahun 2008 Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Dengan dikeluarkan peraturan daerah tersebut, maka segala kewenangan (termasuk hal-hal yang menyangkut masalah dana, pegawai, sarana, prasarana, pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan dalam pembinaan dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan pelayanan umum di bidang industri dan perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas di bidang industri dan perdagangan.

#### **4.2.2 Susunan Organisasi**

Susunan organisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Bina Program
- d. Sub Dinas Industri Logam dan Aneka
- e. Sub Dinas Kimia dan Agro
- f. Sub Dinas Perdagangan
- g. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan
- h. Cabang Dinas
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung diangkat dari visi itu sendiri yang mempertimbangkan fenomena otonomi daerah yang berbasis keunggulan lokal.

#### 4.2.3 Visi dan Misi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung meliputi:

- a. Motivator, yang berarti dorongan semangat untuk menumbuh kembangkan industri dan perdagangan.
- b. Industri Tangguh, yang berarti industri yang kemampuan bertahan dan bersaing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis yang berkembang cepat.
- c. Masyarakat Niaga, yang berarti masyarakat profesional dalam norma aturan yang menjadi kesepakatan umum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Pasar Global, yang berarti bahwa pasar bebas atau pasar dunia dalam arti pasar yang mencakup pasar lokal nasional atau internasional.

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah dan perdagangan yang berbasis pada Sumber Daya Alam, serta berorientasi pada pasar global dan ramah lingkungan.
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan.

### 4.3 Gambaran Umum Kecamatan Campurdarat

#### 4.3.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Campurdarat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai luas wilayah 39,77 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan:

- a. Di sebelah Utara : Kecamatan Boyolangu
- b. Di sebelah Timur : Kecamatanm Tanggunggunung
- c. Di sebelah Selatan : Kecamatan Besuki
- d. Di sebelah Barat : Kecamatan Pakel

**Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Campurdarat Menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2008**

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ngentrong	3210	3171	<b>6381</b>
Sawo	3217	2512	<b>5729</b>
Gedangan	1635	1850	<b>3485</b>
Gamping	2215	2184	<b>4399</b>
C. Darat	3921	3987	<b>7908</b>
Wates	3277	3175	<b>6452</b>
Pelem	3815	4022	<b>7837</b>
Pojok	2965	3166	<b>6131</b>
Tanggung	3125	2781	<b>5906</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>27.380</b>	<b>26.848</b>	<b>54.228</b>

Sumber :Kecamatan Campurdarat Dalam Angka 2008

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Campurdarat pada tahun 2008 berpenduduk 54.228 jiwa dengan jumlah laki-laki 27.380 jiwa dan jumlah perempuan 26.848 jiwa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan terdapat perbedaan sebesar 532 jiwa.

**Tabel 4.3: Jumlah Pemeluk Agama Menurut Desa dan Agama yang Dianut Tahun 2008**

Desa	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Jumlah
Ngentrong	6341	5	25	10	-	<b>6381</b>
Sawo	5645	29	40	15	-	<b>5729</b>
Gedangan	3457	6	20	2	-	<b>3485</b>
Gamping	4325	34	31	9	-	<b>4399</b>
C. Darat	7825	35	48	-	-	<b>7908</b>
Wates	6352	44	56	-	-	<b>6452</b>
Pelem	7785	18	31	3	-	<b>7837</b>
Pojok	6119	-	12	-	-	<b>6131</b>
Tanggung	5873	17	11	5	-	<b>5906</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>53.722</b>	<b>188</b>	<b>274</b>	<b>44</b>	-	<b>54.228</b>

Sumber :Kecamatan Campurdarat Dalam Angka 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Campurdarat adalah beragama Islam dengan jumlah 53.722 jiwa sedangkan Katolik sebanyak 188 jiwa, Kristen sebanyak 274 jiwa, Hindu sebanyak 44 jiwa dan tidak ada yang beragama Budha.

**Tabel 4.4: Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Menurut Desa dan Sektor Usaha Tahun 2008**

Desa	Pertanian	Pertmbgan/ Pengglian	Ind. Pengo- lahan	Konst. Bangun- an	Perdagang- an	Angk. Kom- u- nika- si	Jasa	Lain- lain
Ngentrong	465	80	180	72	165	45	55	300
Sawo	380	62	465	80	120	61	66	15
Gedangan	650	-	35	75	29	3	55	39
Gamping	895	5	535	17	77	5	1.250	24
C. Darat	579	18	483	95	440	36	270	56
Wates	995	-	125	100	300	7	95	30
Pelem	930	10	75	190	225	7	180	179
Pojok	960	29	80	73	141	6	72	92
Tanggung	925	-	30	115	154	16	205	311
<b>Jumlah</b>	<b>6.779</b>	<b>204</b>	<b>2.008</b>	<b>817</b>	<b>1.651</b>	<b>186</b>	<b>2.248</b>	<b>1.046</b>

Sumber :Kecamatan Campurdarat Dalam Angka 2008

Khusus untuk usaha pertambangan dan penggalian, dari data tersebut dapat dilihat bahwa Desa Ngentrong merupakan desa yang paling banyak mempunyai usaha tersebut dengan jumlah 80 buah, meskipun usaha pertambangan/penggalian yang dimaksud tidak terbatas hanya pada sektor marmer saja.

#### 4.4 Gambaran Umum Desa Gamping

##### 4.4.1 Letak Geografis

Desa Gamping merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, yang mempunyai luas wilayah 5,72 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan:

- a. Di sebelah Utara : Desa Campurdarat
- b. Di sebelah Timur : Desa Ngepeh
- c. Di sebelah Selatan: Desa Gedangan
- d. Di sebelah Barat : Desa Tamban

Apabila diuraikan, Desa Gamping merupakan sebuah desa yang memiliki usaha marmer dalam jumlah yang paling banyak. Desa ini merupakan desa kecil yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi bentuk yang indah dan kreatif. Hal ini terlihat dari hasil produk yang terbentuk mempunyai kualitas yang bagus.

Selain itu hampir setiap rumah di desa ini mempunyai usaha marmer. Di sepanjang jalan pada area Desa Gamping juga banyak marmer yang masih mentah atau belum diolah.

#### 4.4.2 Keadaan Penduduk Desa Gamping

Keadaan penduduk di Desa Gamping memang tidak padat seperti di kota. Akan tetapi keterampilan yang dimiliki mayoritas secara otodidak mampu memberikan kontribusi penting terhadap Pembangunan Daerah. Jumlah penduduk di Desa Gamping dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Desa Gamping Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	2.215
2.	Perempuan	2.184
<b>JUMLAH</b>		<b>4.399</b>

Sumber: Profil Desa Gamping Tahun 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Gamping tahun 2008 antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terdapat perbedaan yang tidak terlalu banyak, yaitu memiliki selisih sebanyak 31 jiwa.

**Tabel 4.6: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petani	895
2.	Pekerja di sektor jasa/perdagangan	1.250
3.	Pekerja di sektor industri	535

Sumber: Profil Desa Gamping Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk dengan jumlah paling banyak adalah bermatapencaharian di sektor jasa atau perdagangan, sedangkan jumlah penduduk dengan jumlah paling sedikit adalah bermatapencaharian di sektor industri. Keduanya memiliki selisih jumlah penduduk 360 jiwa.

#### 4.5 Sejarah Perkembangan Industri Marmer Di Kecamatan Campurdarat

Batu marmer merupakan hasil dari proses metamorfosa dari batu kapur yang menyebabkan kristalisasi sebagai akibat dari pengaruh temperatur dan tekanan yang dihasilkan oleh alam. Proses ini terbentuk 30-60 juta tahun yang lalu atau dalam bahasa geologi disebut berumur *kwartier-tertier*. Kecamatan Campurdarat mempunyai potensi alam yang cukup banyak, salah satunya adalah batu marmer. Deposit marmer saat ini diperkirakan masih terdapat sebesar 4.000.000 m<sup>3</sup> terdapat di Kecamatan Campurdarat terletak dalam deretan pegunungan kapur selatan yang terbentuk karena adanya proses geologi. Marmer tersebut termasuk jenis marmer yang berbutir sangat halus, struktur padat dengan kuat tekanan yang tinggi dan tingkat keausan yang sangat rendah. Warna dasar adalah warna gading dengan beberapa nuansa, yang garis besarnya dibedakan dari warna terang sampai gelap.

Berdasarkan variasi warna dan tekstur marmer yang dimilikinya, maka marmer terbagi atas:

1. Marmer *statuary*, berstuktur halus dan berwarna putih
2. Marmer *architectur*, berstuktur agak kasar dan warnanya abu-abu sampai coklat
3. Marmer *ornamental*, warnanya putih sampai krem dan cerah
4. Marmer *onix*, berstuktur halus dan jernih yang terdiri dari mineral organik dan kalsit
5. Marmer *cipolin*, warnanya bervariasi dan punya urat-urat *mica* maupun *sepertin*
6. Marmer *ruin*, mempunyai tekstur halus dengan bentuk segi tiga tidak teratur
7. Marmer *breccia*, mempunyai tekstur yang relatif kasar dan bentuknya persegi tidak sama
8. Marmer kerang, merupakan jenis marmer dominan mengandung fosil

Batu marmer itu didapat dari hasil penambangan yang menghasilkan blok-blok marmer dari deposit tambang marmer yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai jual

yang tinggi. Dari batu marmer tersebut diolah yang dapat menghasilkan lantai, lapis dinding, dan *souvenir-souvenir* cantik.

Pada saat menjajah Indonesia, Belanda melakukan penelitian dan pengembangan batu marmer di Kabupaten Tulungagung selatan, yang dikenal dengan marmer Wajak Tulungagung. Setelah meninggalkan Indonesia dan Indonesia merdeka, pemerintah melakukan penelitian kembali tentang batu marmer yang ada pada deretan Gunung Kapur Selatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka pada awal tahun 1961 pemerintah menetapkan berdirinya proyek marmer di Tulungagung, yaitu di Desa Besole Kecamatan Besuki. Proyek marmer Tulungagung merupakan perintis industri marmer di Indonesia dan berkembang maju, sehingga pada tahun 1971 status proyek marmer berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung (IMIT). Berbagai bangunan didirikan, baik milik pemerintah maupun swasta yang tertarik dengan potensi pasar marmer di daerah-daerah yang terdapat banyak deposit marmer. Kemudian dengan pertimbangan bahwa komoditi marmer bukan merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dan industri marmer telah mampu dijalankan oleh pihak swasta, maka pemerintah memutuskan menjual seluruh saham perusahaan BUMN tersebut kepada swasta.

Industri marmer yang ada di Kecamatan Campurdarat sendiri sudah mulai pada tahun 1965. Industri tersebut awalnya dirintis oleh seorang warga di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, bernama Bapak Karsun. Mulanya Bapak Karsun ini hanya membuat batu nisan yang sederhana dengan peralatan yang sederhana. Karena memiliki nilai jual dan banyak peminatnya, serta bahan baku yang banyak tersedia disekitar rumah mereka, kemudian industri kerajinan marmer ini mulai dilirik oleh warga di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat tersebut.

Baru sekitar tahun 1982, pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung mulai melakukan pembinaan terhadap para pengrajin marmer. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya UPT (Unit Pelayanan Teknis) di Desa Gamping Kecamatan

Campurdarat, yang menyediakan peralatan yang lebih lengkap untuk dipinjamkan kepada para pengrajin marmer yang pada saat itu belum mereka miliki.

Sejak pemerintahan orde baru, industri marmer yang ada di Kecamatan Campurdarat merupakan industri andalan dari Kabupaten Tulungagung yang berkembang sangat pesat. Daerah pemasarannya pun sampai menembus pasar luar negeri. Hal ini dikarenakan batuan marmer yang ada di Kecamatan Campurdarat mempunyai kualitas yang sangat baik dan sulit ditemukan di daerah lain.

Akan tetapi sekitar tahun 1997 atau sejak krisis moneter yang melanda Indonesia yang diikuti dengan ketidakstabilan ekonomi negara yang berkepanjangan, hal tersebut berdampak terhadap kelangsungan industri marmer yang ada di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Campurdarat. Ketidakmampuan para pengrajin dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, menyebabkan banyak yang terpaksa gulung tikar dan beralih ke usaha lain. Data yang terakhir dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa pada tahun 2008 yang lalu, terdapat 271 industri marmer skala kecil dan menengah. Dampak yang cukup besar terlihat pada industri besar, yang dulunya berjumlah puluhan, kini hanya tersisa dua industri saja, yaitu IMIT (Industri Marmer Indonesia Tulungagung) dan PT. Dwi Tunggal Marmer Indah.

Industri skala kecil dan menengah sektor marmer yang ada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung memang jauh lebih banyak dari pada jumlah industri besar. Namun tidak sedikit pula yang menutup usahanya karena tidak mampu bertahan di tengah keterpurukan ekonomi Indonesia yang sampai saat ini belum dapat teratasi.

Hingga saat ini industri marmer masih lumayan banyak yang bertahan dan pengrajin yang tercatat di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tiap tahun mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut hanya kecil. Pemerintah berusaha untuk mengembalikan kejayaan, mengingat kontribusi industri marmer tersebut, terutama yang ada di Kecamatan Campurdarat. Peran yang paling menonjol adalah dalam hal pemasukan terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang mempunyai latar belakang pendidikan formal rendah.

## 4.6 Penyajian Data Fokus Penelitian

### 4.6.1 Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pemberdayaan UKM Industri Kerajinan Marmer

Dalam upaya memberdayakan industri kecil dan kerajinan, termasuk pula industri menengah Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyusun kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan pemberdayaan tersebut. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini lebih bersifat umum (untuk seluruh jenis industri), hal ini mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan jenis industri yang ada di Kabupaten Tulungagung karena setiap industri itu memiliki karakter dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga hal itu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Bahwa untuk menunjang pemberdayaan industri kecil dan kerajinan yang ada di Kabupaten Tulungagung telah disusun Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) untuk kurun waktu 10 tahun, yaitu mulai 2001 dan berakhir 2010. Pembuatan kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Namun tidak semua kebijakan tersebut sesuai dengan semua jenis industri yang ada di Kabupaten Tulungagung, karena tiap industri kan memiliki karakter dan permasalahan yang berbeda-beda pula” (*wawancara pada 20 Januari 2010 jam 09.15 di tempat kerja*)

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dituangkan dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) yang diartikan untuk merencanakan pola tentang pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan di Tulungagung sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan yang sejalan dengan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) di Jawa Timur.

Adapun pola pembinaan sebagai wujud pemberdayaan Industri Kecil Kerajinan yang akan dibuat dalam Rencana Induk ini disusun melalui pendekatan perwilayahan, pendekatan sistem dan pendekatan permasalahan dengan tetap

memperhatikan dan memilih wilayah terkecil setingkat desa yang mempunyai potensi sebagai sentra-sentra industri kecil dan kerajinan.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat terlaksana penjabaran kegiatan industri kecil secara efektif dalam rangka pemerataan kesempatan kerja yang mampu memberikan pengaruh positif bagi pengembangan kehidupan ekonomi di desa. Pola Pembinaan dan Pengembangan yang akan dituangkan dalam Rencana Induk ini dibuat untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dari 2001 sampai dengan tahun 2010.

Pola tersebut diatas, secara normal akan didukung dengan kriteria - kriteria perencanaan yang berlaku, terutama secara regional. Dengan adanya suatu Rencana Induk bagi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Tulungagung, diharapkan dapat memberikan pedoman dasar / acuan sebagai pelaksanaan teknis dan administratif, mengenai Pertumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan, baik pada tingkat Kabupaten maupun tingkat Desa dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan perencanaan dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan ini tidak terlepas dari Perencanaan Pembangunan Desa secara hirarki merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah dan pada akhirnya Rencana Pembangunan Daerah itu secara keseluruhan akan mendukung Pembangunan Nasional.

Adapun kebijakan yang termuat dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) Kabupaten Tulungagung meliputi:

- a) Program Pokok, yang terdiri dari :
  1. Program pengembangan industri kecil dan kerajinan termasuk rumah tangga
  2. Program peningkatan dan pengembangan industri kecil berbasis pertanian
  3. Program pengembangan sumber daya manusia
  4. Program pengembangan sistem informasi
  5. Program peningkatan kemampuan teknologi

6. Program pengembangan pemasaran
7. Program pembinaan dan pengembangan usaha
8. Program penciptaan dan wirausaha baru
9. Program peningkatan sarana dan prasarana usaha

b) Program Penunjang, terdiri dari:

Yang dimaksud program penunjang adalah rangkaian program-program yang mempunyai keterkaitan dengan program pokok. Hal tersebut dapat diartikan bahwa program pendukung memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan di Kabupaten Tulungagung. Program pendukung ini meliputi:

1. Program penataan struktur industri
2. Program pengendalian pencemaran lingkungan
3. Program penelitian dan pengembangan terapan
4. Program standarisasi

Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Tulungagung pada kurun waktu tahun 2001-2010 (sesuai dengan RIPPIK) adalah:

1. terwujudnya sektor industri yang kuat dan maju sehingga mampu menunjang terciptanya perekonomian yang semakin terbuka, mandiri dan handal
2. terciptanya industri yang berdaya saing tinggi dengan mendorong industri padat tenaga kerja menjadi terampil, yang didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas
3. struktur industri yang kokoh dan seimbang dengan keterkaitan yang erat antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gejolak situasi ekonomi yang ada
4. industri yang semakin tersebar dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara serasi sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi
5. berkembangnya industri prioritas yang menghasilkan produk-produk unggulan

6. semakin berkembangnya industri kecil dan menengah sebagai tulang punggung pembangunan industri, terutama sebagai pemasok dan penopang industri unggulan

Sedangkan sasaran pokok yang akan dicapai melalui program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung adalah:

1. peningkatan pemasaran baik mengenai pasar umum maupun pasaran keterkaitan dan pasaran ekspor
2. peningkatan teknologi produksi, yang memungkinkan dicapainya mutu produksi yang tinggi sehingga dapat dihasilkan produk yang memenuhi syarat untuk standart ekspor
3. peningkatan sarana dan prasarana usaha sehingga mampu mendorong lebih berfungsinya sentra-sentra industri kecil dan menengah di daerah pedesaan
4. peningkatan efisiensi melalui peningkatan organisasi manajemen dan semangat kewiraswastaan
5. peningkatan peran koperasi dalam pengembangan industri kecil dan menengah di wilayah pedesaan
6. peningkatan keterkaitan antara industri kecil, kerajinan, industri menengah dan industri besar, serta dengan sektor-sektor lainnya
7. peningkatan swadaya masyarakat melalui peningkatan usaha gotong royong dan pemantapan kemampuan permodalan
8. terciptanya lingkungan usaha dan lingkungan desa yang serasi

Karena kebijakan yang ada tersebut tidak semuanya sesuai dengan karakter dan kondisi permasalahan dari industri marmer yang ada di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung maka, upaya dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk memberdayakan industri marmer haruslah disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Keterangan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Kami telah memiliki kebijakan tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah guna menunjang kegiatan tersebut. Karena kebijakan yang telah ditentukan tidak semuanya sesuai dengan karakter dan permasalahan dari industri itu, maka apabila akan memberdayakan industri marmer di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat harus disesuaikan dengan keadaan disana yang meliputi aspek permodalan, pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia dan pemasaran” (wawancara 20 Januari 2010 jam 09.25 di tempat kerja )

Dengan adanya Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan diharapkan dapat memberikan jawaban secara optimal terhadap dua kepentingan pokok sebagai berikut :

#### 1. Kepentingan Daerah

Kepentingan daerah dimaksudkan untuk menciptakan perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja di daerah-daerah sebagai penjabaran konkrit dari konsepsi pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung.

#### 2. Kepentingan Desa

Kepentingan desa dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan desa terutama Agroindustri melalui pengembangan industri yang berpijak pada 8 (delapan) basis, ekonomi yang relatif ada di wilayah pedesaan, yaitu :

- Tanam-tanaman
- Perikanan
- Peternakan
- Industri kecil kerajinan
- Seni budaya
- Pariwisata
- Tenaga kerja
- Pertambangan

Adapun kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, meliputi:

#### 4.6.1.1 Penyediaan Modal Usaha

Permodalan merupakan salah satu masalah yang selama ini dihadapi para pengrajin marmer baik yang berskala usaha kecil maupun yang berskala usaha besar, terutama adalah modal kerja. Modal merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha, karena modal dapat digunakan untuk membeli bahan baku, proses produksi, membayar upah pegawai dll. Sebagian besar dari pengrajin banyak yang menggunakan modal sendiri untuk membiayai usahanya.

Seperti yang dikatakan Bapak Purwandi, pemilik usaha marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung:

“Masalah yang sering saya hadapi itu masalah permodalan, karena modal yang digunakan adalah modal yang berasal dari modal pribadi sehingga sangat terbatas dan usaha sulit untuk berkembang. Saat ini usaha marmer yang tidak dapat dipastikan dan mengalami naik turun juga mengakibatkan saya enggan untuk mengajukan kredit pada pihak perbankan karena dikawatirkan tidak dapat mengembalikan kredit usaha tersebut apalagi untuk mengajukan kredit persyaratannya ribet sedangkan kredit dari Kabupaten terlalu kecil” (*wawancara 21 Januari 2010 jam 09.10 di tempat kerja*)

Sama halnya dengan Bapak Purwandi, ungkapan dari Bapak Suroso yang merupakan pemilik usaha marmer juga merasakan sulitnya permodalan merupakan kendala yang seringkali dihadapi dalam mengembangkan usahanya.

“Pertama kali saya memulai usaha ini masalah yang sering saya hadapi adalah masalah permodalan. Terus terang masalah ini membuat saya merasa kesulitan dalam meningkatkan usaha marmer. Tetapi dengan tekad yang kuat saya terus berusaha menjalankan usaha ini dengan modal pribadi walaupun sedikit” (*wawancara 21 Januari 2010 jam 10.00 di tempat kerja*)

Cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- a. Memberikan rekomendasi kepada industri kecil untuk melakukan pinjaman kepada pihak bank.
- b. Menganggarkan kucuran dana kredit bagi industri kecil yang berasal dari propinsi.

Kredit usaha ada dua macam yaitu ada yang berasal dari Kabupaten dan dari Propinsi. Kredit usaha yang berasal dari Kabupaten berkisar 10 jutaan dengan bunga sebesar 0,67 % per tahun sedangkan yang berasal dari propinsi lebih besar

yaitu sebesar 200 jutaan dengan bunga sebesar 6 % per tahun. Apabila dilihat dari kredit usaha yang berasal dari Kabupaten dianggap sangat kurang untuk dapat membantu menjalankan usaha marmer dikarenakan untuk membeli bahan baku saja sangat mahal jadi sangat kurang, sedangkan kredit usaha yang berasal dari Propinsi dianggap terlalu besar sehingga dikawatirkan tidak mampu untuk membayar cicilannya.

Menurut Pak Wayan, Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung:

“Bahwa saat ini untuk mengajukan kredit kepada pihak perbankan sangat sulit dikarenakan banyak dari pengrajin yang telah menjadi *black list* pihak perbankan oleh sebab itu untuk pihak perbankan sangat selektif untuk memberikan kredit usaha karena tidak mau kecolongan” (wawancara 20 Januari 2010 jam 10.00 di tempat kerja)

Akan tetapi kebijakan dari pemerintah dalam aspek permodalan tersebut dirasakan masih belum tepat sehingga masalah kesulitan modal yang dialami oleh pengrajin marmer di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung belum dapat teratasi dengan baik. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi para pengrajin yang berupa penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan kredit modal maupun kredit usaha kepada pihak bank. Sedangkan kewenangan dalam memutuskan diterima atau tidaknya pengajuan kredit tersebut berada di tangan bank, yang dalam hal ini adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kabupaten Tulungagung Cabang Kedungwaru.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasan Bisri Kepala Seksi Industri Kimia, sebagai berikut:

“Biasanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi para pengrajin yang akan melakukan pinjaman ke bank, berupa rekomendasi dan untuk dapat melakukan pinjaman pengrajin harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu juga ada bantuan untuk pengembangan UKM yang diberikan oleh propinsi, namun belum dimanfaatkan oleh pengrajin secara optimal” (wawancara 20 Januari 2010 jam 09.00 di tempat kerja)

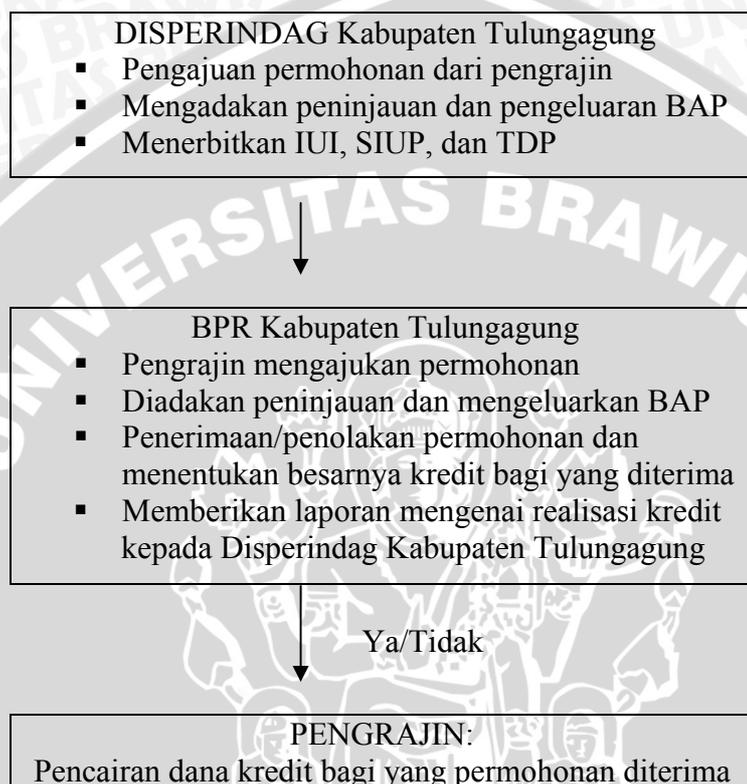
Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, juga menjelaskan untuk mengajukan kredit usaha pada pihak bank, ada beberapa tahap persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu:

1. Para pengrajin mendaftarkan perusahaan mereka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Kemudian dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung melakukan peninjauan langsung ke lokasi industri yang akan didaftarkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pihak yang mengajukan kredit usaha tersebut benar-benar memiliki usaha, yang nanti hasilnya ditulis dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah BAP selesai, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung mengeluarkan surat pengantar kepada bank tentang pengajuan kredit usaha sekaligus mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dikeluarkan oleh KPT (Kantor Pelayanan Terpadu). Apabila para pengrajin telah memiliki IUI, SIUP, dan TDP, tiap tahunnya mereka harus mendaftarkan ulang apabila usahanya masih berjalan.
2. Tahap yang kedua adalah peninjauan langsung yang dilakukan oleh BPR Cabang Kedungwaru itu sendiri yang hasilnya nanti dituangkan dalam BAP, dan hasil dari BAP itu sendiri yang nantinya menentukan apakah pengajuan kredit usaha yang diajukan dapat diterima atau tidak oleh BPR Cabang Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan juga menentukan dalam besarnya kredit usaha yang akan disalurkan.
3. Tahap yang terakhir adalah pencairan dana kredit bagi yang disetujui oleh bank, dan selanjutnya pihak bank memberikan laporan realisasi dana tersebut beserta rincian angsuran yang telah maupun belum dibayarkan oleh pengrajin yang telah menerima kredit pada periode sebelumnya.

Usaha Industri Kecil disentra kerajinan, secara umum yang menggunakan modal sendiri sebanyak 77,50% dan yang menggunakan modal dari Bank sebanyak 18,50% sedangkan sisanya sebanyak 6% dari sumber lainnya. Dari data yang ada diketahui bahwa yang memerlukan tambahan modal sebanyak 80,50% digunakan untuk tambahan modal kerja sebanyak 66,50% dan tambahan modal

investasi sebanyak 33,50%. Berdasarkan hal tersebut seharusnya dapat memanfaatkan tambahan modal dari perbankan, lembaga keuangan yang lain melalui fasilitas kredit, namun kesempatan yang ada tidak dimanfaatkan, hal tersebut kemungkinan terbentur persyaratan kredit berupa agunan / jaminan.

Mekanisme pengajuan kredit dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.2: Mekanisme Pengajuan Kredit UKM**

Pada kesempatan yang sama, Bapak Hasan Bisri Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, mengatakan bahwa:

“Tidak hanya BPR Kedungwaru saja yang melayani kredit UKM melainkan semua BPR yang ada di Kabupaten Tulungagung juga melayani masalah kredit untuk UKM, akan tetapi untuk masalah kredit UKM yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung hanya BPR cabang Kedungwaru yang ditunjuk untuk melayani masalah dana tersebut dikarenakan BPR cabang Kedungwaru merupakan milik daerah Kabupaten Tulungagung” (wawancara 20 Januari 2010 jam 10.00 di tempat kerja)

Adapun jumlah pemohon kredit sepanjang bulan Januari 2008 hingga Maret 2008 berjumlah 31 orang yang mengajukan penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Mengenai rincian dana kredit UKM yang telah dikucurkan oleh BPR Kabupaten Tulungagung Cabang Kedungwaru adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7: Realisasi Dana Kredit UKM Dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung**

Tahun	Realisasi
2004	Rp. 308.150.000
2005	Rp. 296.400.000
2006	Rp. 293.000.000
2007	Rp. 289.000.000

Sumber: Disperindag Kab. Tulungagung 2008

Dari tabel realisasi dana kredit UKM diatas diketahui dari tahun 2004 hingga tahun 2007 terus mengalami penurunan karena tiap tahunnya jumlah pemohon kredit juga turun. Penurunan yang terjadi dari tahun 2004 hingga tahun 2007 itu sebesar 6,2 %. Penurunan yang berjumlah paling banyak terjadi pada tahun 2004 hingga 2005.

Selanjutnya penulis mendapatkan informasi dari Bapak Karyoso, pengrajin marmer di Desa Gamping, yang juga mengajukan kredit,

“Kredit saya tahun lalu sempat di tolak oleh bank gitu *mbak*, ya memang tahun 2004 saya pernah mendapatkan kredit dari bank namun di saat membayarnya saya kesulitan jadi sering telat karena waktu itu pasar lagi sepi” (wawancara 10 Januari 2010 jam 09.00 di tempat kerja)

Di sisi lain penulis juga mendapatkan informasi dari pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang disampaikan oleh Bapak Muniran yang juga mengajukan kredit yang telah direalisasikan:

“Sekitar bulan Maret tahun 2007, saya mulai mengurus pengajuan kredit ke bank, dan *alhamdulillah* sudah dikabulkan, tapi harus nunggu agak lama karena dua bulan kemudian dananya baru cair dan jatuh pada bulan Mei. Rencananya modal tersebut mau saya gunakan untuk menambah

kapasitas produksi karena akhir-akhir ini permintaan meningkat”  
(wawancara 20 Januari 2010 jam 09.00 di tempat kerja)

Mengenai pencairan dana yang telah disetujui, Bapak Hasan Bisri, selaku Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa hal itu tergantung pada dana yang tersedia. Ada yang hanya dalam waktu tiga minggu sudah direalisasi, namun ada pula yang sampai dua atau tiga bulan baru terealisasi. Sedangkan mengenai disetujui atau tidaknya permohonan kredit, itu tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan.

#### 4.6.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia

Selain masalah modal, para pengrajin juga mengalami masalah dalam hal manajemen (kemampuan SDM dalam memajemen usaha yang kurang baik). Manajemen merupakan suatu proses mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Kemampuan untuk memajemen usaha merupakan suatu faktor kunci dalam keberhasilan kita untuk menjalankan usaha. Tanpa adanya manajemen yang baik mustahil usaha dapat berkembang dengan baik pula. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan program untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia yang termuat dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) Kabupaten Tulungagung yang meliputi:

1. Mengadakan pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan serta etos kerja di kalangan pengusaha sendiri
2. Peningkatan dan profesionalisme tenaga pembina industri dengan memperbanyak jenis pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembinaan

3. Mempromosikan kesadaran akan mutu kepada industri marmer berupa pelatihan-pelatihan dalam penerapan manajemen dan sistem pengendalian mutu.

Keterangan mengenai masalah manajemen usahanya juga dijelaskan oleh Bapak Purwandi, pemilik usaha marmer di Desa Gamping yang menyatakan:

“Bahwa selama ini saya masih menggunakan pembukuan yang sederhana saja dengan nota-nota disusun secara rapi dan biasanya untuk masalah manajemen ini saya serahkan kepada anak saya” (*wawancara 21 Januari 2010 jam 11.00 di tempat kerja*)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Hasan Bisri, menurut Bapak Hasan Bisri, Kepala Industri Kimia dan Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai berikut:

“UKM marmer ini masih banyak yang menggunakan manajemen yang sederhana, biasanya menggunakan pembukuan yang sederhana. Karena pembukuan yang kurang jelas tersebut biasanya antara uang pribadi dengan modal usaha menjadi campur menjadi satu sehingga mengakibatkan modal usaha digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi juga” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 11.15 di tempat kerja*)

Pada wawancara selanjutnya Bapak Hasan Bisri juga menambahkan bahwa,

“Pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah sendiri mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia akan tetapi tidak dapat dilakukan tiap tahun dan terus-menerus jadi harus bergiliran. Terlebih lagi untuk tahun 2008 ini dana yang dianggarkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan untuk industri marmer tidak ada, karena untuk tahun 2008 ini dana dianggarkan untuk pembinaan dan pengembangan industri genteng” (*wawancara 20 Januari jam 10.00 di tempat kerja*)

Akibat keterbatasan dana yang dimiliki mengakibatkan program pembinaan dan pengembangan tidak dapat dilakukan secara rutin melainkan harus bergantian dengan industri yang lain, biasanya kegiatan pembinaan ini dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun sekali. Menurut data yang diperoleh, program pembinaan dan pengembangan untuk para pengrajin marmer terakhir kali dilakukan pada tahun 2004 silam dan untuk tahun 2009 ini seperti yang dikatakan Bapak Hasan Bisri tidak ada program pembinaan dan pengembangan untuk pengrajin marmer karena untuk tahun 2009 ini program pembinaan dan

pengembangan dilakukan untuk pengrajin genteng. Dalam program pembinaan dan pengembangan tahun 2004 silam yang bekerjasama dengan BATAN (Badan Tenaga Atom) Jakarta tersebut membahas tentang materi mengenai pembukuan, manajemen usaha, kewirausahaan, penggunaan teknologi tepat guna dan sebagainya.

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) di Kabupaten Tulungagung yang merupakan Perencanaan untuk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada kebijaksanaan serta memperhatikan kebutuhan dan manfaat dengan mengikuti mekanisme perencanaan sebagai berikut :

#### Tahap I : Pra Perencanaan (*Pre Planning*)

Dalam Pra Perencanaan hendaknya dapat dirumuskan mengenai hal-hal kebijaksanaan serta kebutuhan dan manfaat yang sangat Prioritas untuk dilaksanakan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

##### Langkah Pertama :

Mengadakan identifikasi kondisi saat itu pada sasaran sebagai tujuan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan

##### Langkah Kedua :

Menetapkan serta merumuskan permasalahan maupun pemecahan permasalahan pada sasaran pembinaan dan pengembangan

##### Langkah Ketiga :

Mensinkronisasikan antara langkah Pertama dengan Langkah Kedua yang selanjutnya dapat tersusunnya "PROFIL PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN" pada masing-masing sasaran Pembinaan.

#### Tahap II : Perencanaan

Dalam tahap perencanaan judul merupakan kegiatan rencana kerja serta laporan yang akan dilaksanakan termasuk penentuan target yang di harapkan.

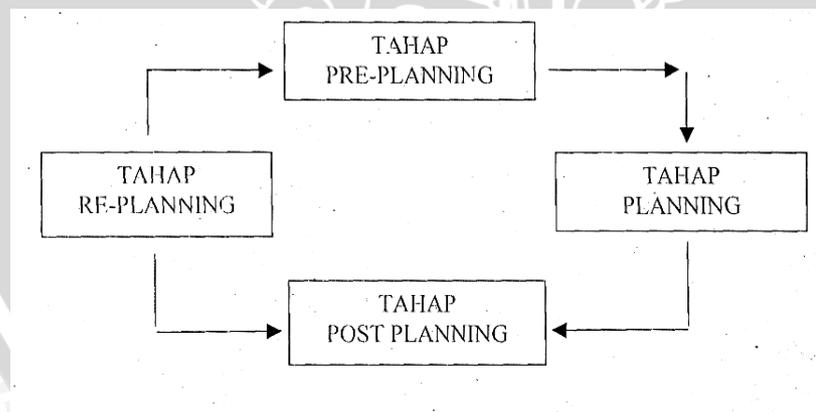
Tahap III : Sesudah Perencanaan (*Post Planning*)

Dalam tahap sesudah perencanaan ini (*Post Planning*) adalah bersifat evaluasi setelah pelaksanaan rencana, merupakan kegiatan penilaian mengenai pencapaian target Perencanaan tersebut harus dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Tahap IV : Perencanaan Kembali (*Re Planning*)

Pada tahap Perencanaan kembali (*Re Planning*) adalah merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan selanjutnya.

Dalam Perencanaan kembali ini dapat merupakan proses Perencanaan pada tahap sebelumnya yang telah dilakukan atau dapat pula merupakan proses perencanaan yang baru dengan didasarkan pada yang telah dicapai dalam proses kegiatan terdahulu. Sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut maka secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut yang merupakan daur perencanaan :



**Gambar 4.3: Mekanisme Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan UKM Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan pada mekanisme Perencanaan tersebut dan diaplikasikan sistem Perencanaan Pembangunan yang ada dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan pada umumnya dan tercapainya pembangunan pada

Industri Kecil dan Kerajinan yang berada di desa-desa serta berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri No.4 tahun 1981 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1982, maka proses Perencanaannya disusun secara bertahap atau hierarki sebagai berikut :

Langkah pertama

Musyawarah Pembangunan (MUSBANG) tingkat desa atau kelurahan yang tujuannya merupakan usulan kegiatan pada desa tersebut

Langkah ke dua

Temu karya pembangunan tingkat Kecamatan, yang merupakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi rencana program pada tingkat Kecamatan, yang selanjutnya merupakan usulan rencana kerja pada unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)

Langkah ke tiga

Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) tingkat II

Langkah ke empat

Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) tingkat I

Langkah ke lima

Konsultasi Regional Pembangunan

Langkah ke enam

Konsultasi Nasional Pembangunan

Langkah ke tujuh

Penyusunan dan pengusulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk APBN; APBD I; APBD II

Langkah ke delapan

Penyusunan DIP (Daftar Isian Proyek) dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tingkat I maupun Tingkat II

#### 4.6.1.3 Pemanfaatan Fasilitas Teknologi

Industri kecil masih banyak menggunakan teknologi yang sederhana atau boleh dibilang masih tradisional. Dengan keterbelakangan teknologi yang dimiliki tidak hanya membuat rendahnya total faktor *productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga mengakibatkan rendahnya kualitas produk yang

dibuat. Untuk mengatasi masalah pemanfaatan teknologi yang dihadapi oleh para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung telah menyusun kebijakan berupa program-program guna meningkatkan kemampuan teknologi, seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Kerajinan (RIPPIK) Kabupaten Tulungagung yang meliputi:

1. Peningkatan pelayanan teknis, melalui peningkatan fungsi UPT
2. Peningkatan kemampuan inovasi teknologi melalui pengolahan, rancang bangun dan rekayasa
3. Peningkatan pelaksanaan ahli teknologi dan diseminasi teknologi
4. Meningkatkan kemampuan teknologi dengan melalui pembuatan *prototype* dan uji coba terapan
5. Pengembangan dan pembinaan dalam rangka standarisasi industri termasuk penyerapannya
6. Meningkatkan dan mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi terapan pada usaha industri kecil dan kerajinan
7. Peningkatan kerjasama sub kontrakting melalui yang diberikan industri besar kepada industri kecil dan menengah
8. Melakukan peningkatan restrukturisasi mesin dan peralatan
9. Peningkatan kemampuan desain produk, mutu dan prestasi

Bagi usaha Industri Kecil di sentra desa kerajinan, teknologi masih erat kaitannya dengan mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi, yang kondisinya, rata-rata dalam keadaan cukup baik sebanyak 60,76%, sedangkan yang kondisinya kurang baik sebanyak 39,24%.

Dari kondisi mesin atau peralatan yang digunakan tersebut, yang sangat membutuhkan perhatian adalah mesin pada cabang industri logam yaitu yang kondisinya cukup baik hanya sebanyak 51,80% dan yang kondisinya kurang baik sebanyak 48,20% sedangkan untuk cabang industri lainnya kondisi mesin dalam keadaan cukup baik rata-rata 81,40% dan yang kondisinya kurang baik 18,60%. Sesuai dengan kondisi tersebut diatas maka permasalahan teknologi yang dihadapi oleh usaha industri kecil di desa kerajinan sebanyak 20,86%.

Pada umumnya, para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung masih belum menggunakan teknologi yang modern dalam menjalankan proses produksi. Mayoritas dari mereka masih menggunakan teknologi yang tradisional yang merupakan warisan turun temurun. Kalaupun ada yang menggunakan teknologi yang sudah lumayan canggih hanya beberapa saja. Dengan peralatan tradisional yang digunakan saat ini, produksi yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Seperti yang dikatakan Pak Didik, pemilik usaha marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung:

“Untuk saat ini usaha yang saya kelola sudah menggunakan peralatan yang relatif lebih canggih namun masih ada beberapa peralatan yang masih sederhana dan kondisinya masih baik. Saya tidak mau mengganti karena harganya mahal”

*(wawancara 21 Januari 2010 jam 12.00 di tempat kerja )*

Kemudian Bapak Karyoso, pengusaha marmer di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat mengatakan bahwa:

“Peralatan yang digunakan dalam proses produksi memang sudah lumayan modern. Beberapa mesin saja yang tidak saya ganti karena selain kondisinya masih baik, saya agak kesulitan dalam membeli mesin yang baru karena harganya kini melambung tinggi” *(wawancara 22 Januari 2010 jam 10.15 di tempat kerja)*

Keterbatasan teknologi yang digunakan oleh para pengrajin di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tersebut sangat dipahami oleh pihak pemerintah, terutama oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Industri kecil masih menggunakan peralatan yang masih sederhana dan terkadang peralatan tersebut diwarisi turun-temurun. Biasanya pengrajin membuat sendiri peralatan tersebut. Namun juga terdapat beberapa pengrajin yang telah menggunakan peralatan yang lebih canggih. Keterbatasan modal yang dimiliki merupakan penyebab utama masih menggunakan peralatan-peralatan yang lama” *(wawancara 20 Januari 2010 jam 11.25 di tempat kerja )*

Menurut Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Kami telah beberapa kali mengadakan diklat-diklat untuk para pengrajin marmer dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mendukung pemanfaatan teknologi. Kami juga memberikan contoh-contoh desain baru untuk produk marmer sehingga produk yang mereka hasilkan tidak monoton dan sesuai dengan selera pasar” (wawancara 20 Januari 2010 jam 08.00 di tempat kerja)

Bapak Budiarto, pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat juga menyatakan bahwa:

“Pernah beberapa kali saya mengikuti diklat yang diadakan oleh pemerintah di balai desa. Isinya tentang penggunaan alat yang tepat yang lebih modern. Selain itu saya juga mendapatkan pengetahuan tentang mendesain produk agar diterima oleh pasar” (wawancara 22 Januari 2010 jam 13.00 di tempat kerja)

Selama ini memang peralatan yang digunakan oleh pengrajin masih tergolong sederhana walaupun canggih hanyalah sebagian saja. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung lebih sering untuk mengadakan diklat agar para pengrajin tidak ketinggalan dengan teknologi yang sedang berkembang.

#### **4.6.2 Dampak Peningkatan Hasil Usaha Sosial Ekonomi dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Marmer dapat dilihat dari:**

##### **4.6.2.1 Peningkatan Pendapatan**

Hal mengenai sulitnya pemasaran produk kerajinan marmer sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang diperoleh dari pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung beserta buruh yang mengerjakan. Oleh karena itu para pemilik usaha haruslah pandai untuk mencari pangsa pasar yang menjanjikan agar pemasukan tetap ada.

Seperti yang dikatakan Bapak Purwandi, pemilik usaha marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat memberikan keterangan:

“Bila dibandingkan dengan sebelum krisis moneter dulu *ya mbak* pendapatan saya memang jauh menurun, akan tetapi *ya alhamdulillah* usaha marmer saya masih tetap dapat berjalan. Pendapatan tiap bulannya tidak pasti, kira-kira omzet tiap bulannya kurang lebih 25 jutaan tetapi saya juga pernah 5-10 jutaan karena pada waktu itu benar-benar permintaan lagi sepi. Usaha wiraswasta seperti saya kan sulit *mbak* untuk

memastikan pendapatan tiap bulannya, kalau permintaan lagi sepi ya pendapatan saya menurun sedangkan kalau permintaan lagi rame ya pendapatan saya meningkat. Tetapi agar pendapatan saya tidak kosong ya saya harus pandai-pandai *mbak* untuk mencari pasar” (wawancara 23 Januari 2010 jam 09.35 di tempat kerja)

Dengan melihat kondisi sepi nya permintaan akan kerajinan marmer tidak hanya berpengaruh terhadap pemilik usaha saja melainkan para buruh yang bekerja karena mereka bekerja bergantung pada pesanan yang ada. Sepinya permintaan akan kerajinan marmer berarti secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Apabila tidak ada borongan para buruh tersebut tidak bekerja dan hanya bekerja di sawah untuk bertani, jadi para buruh tersebut sangat bergantung pada pekerjaan untuk membuat kerajinan marmer. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Tarmudi, buruh yang bekerja pada Bapak Purwandi:

“Bila ada pesanan enak *mbak*, saya bisa tetap dapat bekerja karena sistem kerja saya adalah sistem borongan jadi kalau *pas* lagi rame, pesanan jadi banyak. Ramenya pesanan dalam 1 bulan bisa dapat 3 juta satu kelompok yang berisi 2 orang. Apabila tidak ada pesanan sama sekali saya ya berhenti bekerja dan biasanya saya bertani di sawah” (wawancara 23 Januari 2010 jam 14.00 di tempat kerja)

Akibat krisis yang melanda Bangsa Indonesia tahun 1997 yang lalu mengakibatkan jumlah pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung mengalami jumlah penurunan yang berakibat pada banyaknya pengusaha marmer yang gulung tikar karena tidak mampu menjalankan usahanya kembali. Pada waktu krisis tersebut, industri kerajinan marmer kian terpuruk. Perusahaan yang masih memproduksi berbagai jenis dan model kerajinan berbahan baku marmer ini pun tinggal 30 persen. Berkurangnya jumlah pengrajin marmer di Desa Gamping Kabupaten Tulungagung tersebut dikarenakan ketiadaan modal, kenaikan harga bahan bakar hingga 48% juga ikut mendongkrak biaya operasional.

Hal ini dibenarkan juga oleh Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Akibat dari krisis moneter tahun 1997 itu membuat pasar menjadi sepi, permintaan akan kerajinan marmer juga menurun dan hal ini berdampak terhadap banyaknya pengrajin yang tidak mampu untuk meneruskan

usahanya dan akhirnya gulung tikar” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 14.00 di tempat kerja*)

Walaupun krisis yang melanda Indonesia mengakibatkan jumlah pengrajin marmer mengalami penurunan tetapi hal yang menggembirakan di tahun 2003 jumlah dari pengrajin marmer mengalami peningkatan. Menurut Bapak Hasan Bisri Kepala Seksi Industri Kimia, sebagai berikut:

“Meskipun industri marmer tidak sejaya seperti dulu dan sempat mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2003 pertumbuhan yang baik dari jumlah industri marmer di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu banyak” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 14.30 di tempat kerja*)

Dengan melihat jumlah pengrajin di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang saat ini mulai mengalami peningkatan hal ini merupakan hal yang membanggakan untuk industri marmer kembali pada masa kejayaannya.

#### 4.6.2.2 Pemasaran Hasil Usaha

Pemasaran merupakan tujuan akhir setelah suatu barang selesai diproduksi. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan dan mempromosikan hasil industri kerajinan marmer kepada masyarakat luas baik dari dalam kota maupun luar kota. Selama ini pemasaran tetap menjadi kendala bagi pengrajin di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, apalagi kondisi perekonomian yang belum begitu stabil mengakibatkan pemasaran marmer mengalami penurunan. Kebanyakan dari pengrajin marmer di Desa Gamping belum mampu untuk memasarkan sendiri hasil produksinya, kebanyakan dari mereka masih menggunakan agen untuk dapat memasarkan.

Seperti yang dikatakan Bapak Suroso, pemilik usaha marmer yang ada di desa Gamping:

“Saat ini memang pemasaran marmer agak sulit dan biasanya kita memasarkan kepada agen-agen atau orang-orang yang memiliki *show room* yang besar, dan dari situ kita mendapatkan pesanan. Sampai saat ini yang rutin meminta pesanan adalah dari Yogyakarta dan Bali yang nantinya di ekspor ke mancanegara seperti Amerika Serikat dan Korea” (*wawancara 10 Januari 2010 jam 10.45 di tempat kerja*)

Pak Karyoso, pemilik usaha marmer di desa Gamping Campurdarat Kabupaten Tulungagung juga menjelaskan:

“Jika hanya mengandalkan pemasaran dari pasar lokal saja ya saya sebagai pengusaha kerajinan marmer sulit untuk bertahan *mbak*, karena biasanya pasar domestik itu hanya membeli produk untuk sekali sepanjang masa. Oleh karena itu sebagai pemilik usaha marmer harus menerapkan sistem pemasaran jemput bola. Artinya, sebagai produsen jangan hanya menunggu *order* atau pembeli di Tulungagung, tetapi harus gencar mencari pasar, terutama ke daerah wisata yang banyak dikunjungi turis asing” (*wawancara 10 Januari jam 11.00 di tempat kerja*)

Melihat sulitnya usaha untuk memasarkan produk kerajinan marmer para pengrajin haruslah pandai untuk mencari pangsa pasar yang lebih menjanjikan untuk memasarkan produk mereka dan para pengrajin haruslah lebih peka terhadap informasi-informasi seperti informasi tentang pameran sehingga para pengrajin menjadi lebih mandiri dan tidak hanya menunggu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal pemasaran produk mereka.

#### 4.6.2.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap

Jumlah penduduk Tulungagung yang kian tahun kian bertambah menuntut penyediaan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ada, karena yang terjadi saat ini jumlah pengangguran kian bertambah akan tetapi lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu mencukupi. Dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) disebutkan bahwa tujuan dari pembinaan dan pengembangan industri kecil adalah untuk memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Oleh karena itu dengan adanya industri marmer ini dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memecahkan masalah pengangguran.

Menurut Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, sebagai berikut:

“Industri marmer di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung tetap mampu menyerap tenaga kerja terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena di Kecamatan Campurdarat banyak yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga dengan adanya industri marmer ini sangat banyak membantu untuk memberikan lapangan pekerjaan” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 11.20 di tempat kerja*)

Seperti yang dikatakan Bapak Purwandi, pemilik usaha marmer di Desa Gamping:

“Tenaga kerja yang bekerja di tempat saya berjumlah 20-25 orang yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan SD, SMP dan yang paling tinggi SMA. Para pekerja saya hanya berasal dari daerah Campurdarat itu sendiri.” (*wawancara 21 Januari 2010 jam 14.45 di tempat kerja*)

Seperti yang disampaikan Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung:

“Meskipun dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung jumlah industri marmer tercatat mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit, akan tetapi hal tersebut tidak membawa perubahan yang baik untuk penyerapan tenaga kerja yang terjadi malah sebaliknya dari tahun 2002 hingga tahun 2008 terus mengalami penurunan” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 10.05 di tempat kerja*)

**Tabel 4.8: Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UKM Industri Kerajinan Marmer**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Terserap
2002	10.533
2003	10.542
2004	10.517
2005	10.510
2006	10.491
2007	10.450
2008	10.345

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tulungagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja dari tahun 2002 hingga tahun 2008 mengalami penurunan tidak seperti jumlah pengrajin yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penyerapan tenaga kerja ini berdampak tidak baik bagi keberlangsungan usaha ini karena tiap tahun mengalami penurunan. Akan tetapi meskipun menurun para pemilik usaha marmer di tetap mampu mempertahankan usahanya dengan baik.

Pertambahan jumlah industri kecil marmer tiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja. Beberapa pemilik usaha banyak yang mengurangi jumlah pekerja karena permintaan pasar yang sepi. Hal

ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karyoso, pemilik usaha marmer di Desa Gamping:

“Karyawan saya mencapai 25 orang dulu *mbak*, namun karena pasar marmer lagi sepi dengan terpaksa akhirnya saya mengurangi jumlah karyawan hingga 10 orang saja yang tersisa” (*wawancara 10 Januari 2010 jam 10.40 di tempat kerja*)

Melihat menurunnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam tabel diatas seharusnya tidak boleh terjadi dan patut untuk disayangkan karena untuk saat ini jumlah pengrajin marmer kian tahun kian mengalami peningkatan dan hal tersebut seharusnya dapat memberikan lapangan pekerjaan terutama bagi warga sekitar Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat itu sendiri, karena yang banyak terjadi akibat dari permintaan akan kerajinan marmer banyak pemilik usaha yang merumahkan karyawannya yang akhirnya para karyawan tersebut banyak mencari peruntungan untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

#### **4.6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat atas Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Industri Kerajinan Marmer**

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan UKM marmer Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung meliputi:

##### **4.6.3.1 Faktor Pendukung**

Dalam hal pemberdayaan industri marmer yang ada di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung memegang peranan yang sangat penting untuk kemajuan pembangunan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terbuka kesempatan untuk memberdayakan perindustrian dan perdagangan secara optimal di daerahnya. Oleh karena itu peran serta dari pemerintah dalam membina dan mengembangkan industri kecil sangatlah diperlukan agar usaha industri kecil ini dapat berkembang lebih baik, karena untuk menghadapi era pasar bebas kebijakan Pemerintah harus mampu meningkatkan daya saing pelaku ekonomi nasional dan daerah.

Adanya otonomi daerah berarti hal ini merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mampu menciptakan perekonomian di Tulungagung menjadi lebih baik. Dalam hal ini hubungannya dengan memajukan industri marmer yang menjadi primadona bagi Kabupaten Tulungagung yang memiliki prospek cukup menjanjikan untuk terus dapat dikembangkan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Untuk menunjang peran dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memberdayakan UKM di Kabupaten Tulungagung telah disusun Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) untuk kurun waktu 10 tahun, yaitu mulai 2001 dan berakhir 2010. Dalam pembuatan kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Namun tidak semua kebijakan tersebut sesuai dengan semua jenis industri yang ada di Kabupaten Tulungagung, karena tiap industri kan memiliki karakter dan permasalahan yang berbeda-beda pula” (*wawancara 21 Januari jam 09.15 di tempat kerja*)

Dengan disusunnya suatu kebijakan yang disebut dengan RIPPIK (Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan) berarti pemerintah telah memiliki peran dalam memberdayakan UKM marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung walaupun kebijakan tersebut bersifat umum untuk semua jenis industri dan kerajinan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal pengembangan industri kecil menjadi salah satu tugas Pemerintah Daerah yang mana terdapat pada pasal 14 UU No 32 tahun 2004 pada ayat 1 disebutkan bahwa Kabupaten atau Kota memiliki urusan wajib yaitu memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai upaya untuk penanggulangan sosial. Era otonomi daerah bukan merupakan ancaman bagi upaya pengembangan industri dan perdagangan, namun sebaliknya justru memberikan kesempatan dan dukungan bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan. Dengan fasilitas yang telah diberikan tersebut, para pengrajin marmer di Desa Gamping dapat meningkatkan kualitas hasil produksi mereka.

Maka dari itu peranan pemerintah sangat mendukung keberlangsungan usaha untuk para pengrajin marmer, khususnya yang berada pada Desa Gamping.

#### 4.6.3.2 Faktor Penghambat

Dalam melakukan peranan dalam pemberdayaan UKM marmer di Desa Gamping, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung masih menemui factor-faktor penghambat yang bersifat internal. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung adalah masalah pembina teknis (sumber daya manusia) yang ada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hambatan yang terjadi berkaitan dengan sumberdaya manusia antara lain:

- a. Jumlah dan kualitas dari pembina teknis yang ada masih kurang. Pembina teknis haruslah memiliki kemampuan yang lebih jika dibandingkan dengan pengrajin, dan seharusnya mereka benar-benar menguasai secara teknis tentang industri marmer, selain itu kemampuan dari Pembina Teknis haruslah ditunjang dengan latar belakang pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berkaitan dengan komoditi yang dibina.
- b. Tidak ada kesesuaian antara penawaran dan permintaan akan Pembina Teknis pada tingkat keterampilan yang ada.
- c. Manajemen yang dimiliki oleh pengrajin kurang maksimal sehingga menyebabkan tidak ada pengaturan yang jelas antara pengeluaran usaha dan rumah tangga.
- d. Pendidikan pengrajin yang masih rendah, sehingga untuk memberikan pembinaan dan pelatihan membutuhkan waktu yang lama.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suwarno, Kepala Tata Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Kendala yang kami hadapi adalah masalah kekurangan tenaga pembina teknis yang diterjunkan di lapangan, jumlah pembina teknis untuk saat ini belum mencukupi dengan jumlah pengrajin yang akan dibina. (wawancara 23 Januari 2010 jam 10.45 di tempat kerja)

Pendidikan formal yang dimiliki oleh sebagian besar pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung adalah tingkat SLTA.

Hal ini dapat dilihat dari daftar pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

**Tabel 4.9:**

**KOMPOSISI JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN GOLONGAN, JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN**

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 BULAN : OKTOBER 2009

NO.	ESELON	GOLONGAN	JENIS		IJAZAH TERAKHIR							JUMLAH	
			KELAMIN		PENDIDIKAN								
			L	P	S3	S2	S1	DPL.	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	II a	IV d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IV c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IV a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II b	IV d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IV c	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III a	IV a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		III d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	III b	IV b	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4
		IV a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IV a	IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IV a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III d	11	2	-	2	7	-	4	-	-	-	13
		III c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	IV b	III d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			16	2	-	5	9	0	4	-	-	18	

Sumber: Disperindag Kab. Tulungagung, Bagian Tata Usaha, 2009

Selain masalah sumber daya aparatur yang belum begitu memadai, kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam pemberdayaan UKM marmer adalah masalah dana. Dana yang digunakan untuk kegiatan operasional, seperti pengadaan diklat, belum mencukupi. Pembinaan dan pengembangan industri marmer ini menyebabkan kurang optimal.

Dana yang tersedia dari APBD sangat terbatas untuk kegiatan operasional misalnya pengadaan diklat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam melakukan Program pembinaan dan pengembangan industri kecil itu dilakukan secara bergiliran hal ini dikarenakan dana yang ada tidak hanya digunakan untuk pengembangan industri marmer saja.

Seperti yang dijelaskan Pak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung :

“Hambatan yang dialami adalah masalah pendanaan, sehingga tidak dapat melakukan pembinaan dan pengembangan tiap tahun dan terus-menerus jadi harus bergiliran. Terlebih lagi untuk tahun 2009 dana yang dianggarkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan untuk industri marmer tidak ada, karena untuk tahun 2009 dana dianggarkan untuk pembinaan dan pengembangan industri yang lain” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 14.15 di tempat kerja*)

Ketiadaan laboratorium untuk melakukan penelitian juga merupakan masalah. Sehingga dalam melakukan penelitian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung harus mengirim *sample* atau contoh ke Propinsi untuk diteliti. Hal tersebut akan memakan waktu dan biaya yang banyak, dibandingkan dengan memiliki laboratorium sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwarno, Kepala Tata Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini adalah tidak adanya laboratorium untuk penelitian. Apabila ingin meneliti, kita harus mengirim ke Surabaya, tentunya hal ini tidak efektif karena memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 14.30 di tempat kerja*)

Dari Keterangan diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi bukanlah masalah kecil karena dalam melakukan pemenuhan atau penyediaan alat penelitian dan laboratorium membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi penghambat dalam memberdayakan UKM marmer oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain kendala dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga terdapat kendala dari pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat. Pada umumnya para pengrajin mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sehingga berpengaruh terhadap daya tangkap akan program-program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini juga menyebabkan tujuan pemberdayaan yang ditargetkan oleh pemerintah tidak dapat tercapai secara optimal.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hasan Bisri, Kepala Seksi Industri Kimia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

“Para pengrajin mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan banyak yang hanya lulusan SD. Hal tersebut berpengaruh terhadap daya tangkap mereka terhadap materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kami adakan” (*wawancara 20 Januari 2010 jam 11.25 di tempat kerja*)

Bapak Purwandi, pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, juga menyatakan bahwa:

“Pekerja saya rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi mbak, yang tertinggi hanya lulusan SMA. Biasanya mereka itu saya tempatkan di bagian yang lebih mengutamakan tenaga ketimbang keterampilan” (*wawancara 23 Januari jam 10.55*)

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pengrajin marmer juga berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hubungan dengan pihak luar, sehingga akses informasi sangat minim. Mereka juga kurang merespon kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh pemerintah karena beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

Keterbatasan akses informasi juga menyebabkan mereka kesulitan dalam mengamati perubahan dan peluang pasar yang ada. Mereka belum dapat memahami dan kurang informasi tentang pasar potensial untuk barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, para pengrajin marmer juga kurang memahami perubahan selera dan perilaku masyarakat yang menjadi konsumen dari produk yang mereka hasilkan.

## 4.7 Analisa dan Intepretasi Data

### 4.7.1 Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pemberdayaan UKM Industri Kerajinan Marmer

Peran dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan industri marmer sudah sangat baik dengan wujud telah disusun yaitu suatu kebijakan atau program-program yang bertujuan untuk dapat mengembangkan industri kecil, menengah dan kerajinan, yang kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama dari BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung.

Adapun kebijakan yang termuat dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) Kabupaten Tulungagung tersebut melalui:

- a. Program Pokok, yang terdiri dari atas:
  1. Program pengembangan industri kecil dan kerajinan termasuk rumah tangga
  2. Program peningkatan dan pengembangan industri kecil berbasis pertanian
  3. Program pengembangan sumber daya manusia
  4. Program pengembangan system informasi
  5. Program peningkatan kemampuan teknologi
  6. Program pengembangan pemasaran
  7. Program pembinaan dan pengembangan usaha
  8. Program penciptaan dan wirausaha baru
  9. Program peningkatan sarana dan prsarana usaha
- b. Program Penunjang

Yang dimaksud program penunjang adalah rangkaian program-program yang mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan program pokok. Hal tersebut dapat diartikan bahwa program pendukung memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan di Kabupaten Tulungagung. Program pendukung ini meliputi:

1. Program penataan struktur industri
2. Program pengendalian pencemaran lingkungan

3. Program penelitian dan pengembangan terapan
4. Program standarisasi

Sedangkan sasaran pokok yang akan dicapai melalui program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung adalah:

1. peningkatan pemasaran baik mengenai pasar umum maupun pasaran keterkaitan dan pasaran ekspor
2. peningkatan teknologi produksi, yang memungkinkan dicapainya mutu produksi yang tinggi sehingga dapat dihasilkan produk yang memenuhi syarat untuk standart ekspor
3. peningkatan sarana dan prasarana usaha sehingga mampu mendorong lebih berfungsinya sentra-sentra industri kecil dan menengah di daerah pedesaan
4. peningkatan efisiensi melalui peningkatan organisasi manajemen dan semangat kewiraswastaan
5. peningkatan peran koperasi dalam pengembangan industri kecil dan menengah di wilayah pedesaan
6. peningkatan keterkaitan antara industri kecil, kerajinan, industri menengah dan industri besar, serta dengan sektor-sektor lainnya
7. peningkatan swadaya masyarakat melalui peningkatan usaha gotong royong dan pemantapan kemampuan permodalan
8. terciptanya lingkungan usaha dan lingkungan desa yang serasi

Adapun peranan-peranan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap industri kecil, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas dalam usaha industri dan perdagangan terutama industri kecil menengah yang berbasis pada Sumber Daya Alam yang tersedia dan Sumber Daya Manusia yang inovatif dan produktif.
2. Memantapkan kemandirian masyarakat dalam usaha industri dan perdagangan yang semakin berorientasi pada pasar global.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan.
4. Menggerakkan laju ekonomi.

Menurut penulis, adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupa Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan untuk mengembangkan industri yang ada di Tulungagung ini sangat baik karena dengan adanya kebijakan tersebut akan sangat membantu kegiatan pemberdayaan menjadi lebih terarah. Akan tetapi ada hal yang disayangkan yaitu, isi dari Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan (RIPPIK) itu sendiri bersifat umum (untuk semua jenis industri). Padahal diketahui bahwa Kabupaten Tulungagung itu sendiri memiliki jenis industri yang beragam dengan karakter dan permasalahan yang berbeda-beda pula.

Dengan adanya perbedaan karakter dan permasalahan yang terjadi dari tiap-tiap industri tersebut, tentunya dalam upaya untuk pemberdayaannya juga memiliki perbedaan. Hal itu seharusnya dicermati oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar upaya pemberdayaan yang dilakukan tersebut dapat efektif dan tepat sasaran sehingga peran dari pemerintah untuk memberdayakan UKM atau industri yang ada di Kabupaten Tulungagung benar-benar terwujud.

Upaya dari pemberdayaan agar dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran sebaiknya didahului dengan menganalisa permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh industri, dimana hal tersebut juga berlaku pada industri marmer. Menurut penulis hal ini sangat tepat karena kita tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan tanpa mengetahui penyebabnya, begitu pula dengan industri marmer di Kabupaten Tulungagung.

Menurut data yang penulis peroleh di lapangan, kebijakan atau program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi industri marmer yang terdapat di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat, yang meliputi:

#### 4.7.1.1 Penyediaan Modal Usaha

Modal merupakan salah satu kendala yang selama ini dihadapi para pengrajin baik yang berskala usaha kecil maupun yang berskala usaha besar begitu juga dengan industri marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, baik dalam proses awal pendirian usaha hingga dalam

menjalankan usahanya. Karena modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Tambunan (2002:74) bahwa UKM, khususnya UK di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, mobilisasi awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi apalagi investasi (perluasan kapasitas produksi atau menggantikan mesin-mesin tua).

Selama penelitian di lapangan, penulis menemukan suatu kondisi terdahulu bahwa para pelaku industri marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagian besar mengeluhkan tentang sulitnya permodalan sehingga mereka mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Hal ini dikarenakan panjangnya prosedur yang harus dijalani dalam pengajuan kredit dari pihak bank, mereka juga merasa keberatan dengan tingginya suku bunga pinjaman yang harus dibayarkan.

Hal diatas seperti yang diungkapkan oleh Wuri dalam Sulistyowati dan Desembriarto (2005:46), menyatakan bahwa terdapat masalah eksternal yang dihadapi oleh UKM antara lain:

- 1) UKM tidak dapat memperluas usaha karena keterbatasan akses pada sumber permodalan karena semua bank termasuk lembaga perkreditan yang khusus untuk UKM mensyaratkan adanya agunan.
- 2) Adanya distorsi pasar, hak istimewa banyak diberikan pada perusahaan-perusahaan besar misalnya: kemudahan kredit, lisensi bisnis, keringanan pajak, dan penciptaan regulasi yang kondusif.
- 3) Adanya aturan yang kontradiktif dengan upaya pengembangan UKM, misalnya lahirnya perda-perda untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Suku bunga yang relatif tinggi. Dengan masih tingginya suku bunga, UKM akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber pendanaan karena keuntungan yang diperoleh masih dibawah rata-rata.

Menurut penulis, peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dirasa kurang dapat untuk mengatasi masalah permodalan yang dialami oleh para pemilik usaha marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Hal ini terlihat dari kebijakan tentang masalah permodalan yang dibuat, yang menjadi kewenangan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada industri kecil untuk melakukan pinjaman kepada pihak bank.
2. Memberikan kucuran dana kredit kepada pelaku usaha dalam rangka pengembangan UKM yang berasal dari propinsi.

Apabila dilihat dari kredit usaha yang berasal dari Kabupaten dianggap sangat kurang untuk dapat membantu menjalankan usaha marmer dikarenakan untuk membeli bahan baku saja sangat mahal jadi sangat kurang, sedangkan kredit usaha yang berasal dari Propinsi dianggap terlalu besar sehingga dikhawatirkan tidak mampu untuk membayar cicilannya.

Dengan berbagai kendala permodalan yang dihadapi oleh para pengrajin, serta kurangnya peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk selanjutnya para pengrajin masih akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini mengingat modal merupakan faktor penting dalam usaha memberdayakan UKM bagi para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang masih lemah dalam akses modal.

Selain itu, wilayah industri marmer sebagian besar terletak di pelosok desa sehingga menyebabkan mereka mendapatkan informasi tentang kredit usaha, misalnya tentang kucuran dana pengembangan UKM dari Pemerintah tentang jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak bank serta manfaat yang diperoleh dari kredit tersebut.

#### 4.7.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal serupa yang dialami dalam pembinaan SDM karena tingkat pendidikan pengrajin marmer

masih banyak yang masih rendah. Selain itu, kemampuan untuk memajemen usaha juga merupakan suatu faktor kunci dalam keberhasilan kita untuk menjalankan usaha. Tanpa adanya manajemen yang baik mustahil usaha dapat berkembang dengan baik pula. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan program untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia yang termuat dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) Kabupaten Tulungagung yang meliputi:

1. Mengadakan pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan serta etos kerja di kalangan pengusaha sendiri
2. Peningkatan dan profesionalisme tenaga pembina industri dengan memperbanyak jenis pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembinaan
3. Mempromosikan kesadaran akan mutu kepada industri marmer berupa pelatihan-pelatihan dalam penerapan manajemen dan sistem pengendalian mutu.

Program-program yang telah disusun oleh Pemerintah tersebut, baik untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengrajin marmer yang diaplikasikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung pada Desember 2004 yang lalu, merupakan diklat hasil kerjasama dengan Batan (Badan Tenaga Kerja Atom) Jakarta. Kegiatan dari diklat tersebut adalah dengan diberikan materi-materi, seperti pembukuan, pengembangan industri kecil, manajemen usaha, dinamika kelompok, kewirausahaan, manajemen pemasaran, teknologi tepat guna dan praktek pembuatan komposit marmer.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tambunan (2002:78) bahwa, keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, data *processing*, teknik pemasaran dan penelitian pasar.

Sedangkan keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

Menurut penulis, kegiatan yang telah dilaksanakan sangat tepat guna untuk meningkatkan kemampuan SDM karena para aparat pembina teknis dapat berinteraksi secara langsung dengan para pengrajin sebagai obyek yang diberdayakan. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dari para pengrajin dalam hal meningkatkan kualitas produksinya. Akan tetapi kegiatan diklat juga dirasa belum maksimal karena kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin dan jumlah pembina yang sedikit serta peserta yang mengikuti juga terbatas. Dengan keadaan tersebut, maka tingkat keberhasilan diklat sulit untuk diukur.

#### 4.7.1.3 Pemanfaatan Fasilitas Teknologi

UKM pada umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional yang sifatnya masih manual atau semi manual. Dalam proses produksi, biasanya hanya sekitar 25%-40% saja yang dikerjakan oleh mesin, sisanya dengan tangan manusia. Menurut Tambunan (2002:80). Ada beberapa hal yang menyebabkan terbatasnya teknologi yang digunakan oleh UKM, antara lain, keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.

Hal serupa juga dialami oleh para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat dalam melakukan proses produksi. Mereka masih menggunakan peralatan atau mesin yang semi manual. Hanya ada beberapa saja yang menggunakan peralatan modern. Mereka tidak mampu membeli peralatan yang lebih modern karena keterbatasan dana, sehingga mereka masih tetap menggunakan peralatan warisan orang tua yang umurnya belasan tahun.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa kurangnya pemanfaatan fasilitas teknologi yang masih manual dalam hal pemberdayaan industri marmer dirasa kurang efektif dan efisien, sehingga produk yang dihasilkan tidak maksimal. Mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi ini, maka dalam proses pemberdayaan industri marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebaiknya diberikan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih canggih untuk menunjang perolehan hasil produksi yang maksimal. Peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM marmer yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan peran pemerintah yang dijelaskan oleh Tambunan (2002:146) bahwa peranan pemerintah daerah pada tingkat propinsi maupun distrik secara spesifik adalah sebagai berikut:

6. Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM oleh pemerintah pusat
7. Formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan.
8. Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial, pendidikan dan pelatihan.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUKM
10. Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Menurut penulis peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM dirasa kurang maksimal karena kurang sesuai dengan pernyataan diatas. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan peranannya dengan semaksimal mungkin sehingga tidak ada pihak luar atau asing tidak masuk dengan mudah untuk melakukan persaingan dengan para pengrajin yang sudah merintis usahanya terlebih dahulu sehingga industri marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat dapat tetap membanggakan dan memberikan kontribusi penting untuk pemerintah.

#### **4.7.2 Dampak Peningkatan Hasil Usaha Sosial Ekonomi dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Marmer dapat dilihat dari:**

##### **4.7.2.1 Peningkatan Pendapatan**

Pendapatan yang diperoleh para pengrajin marmer sangat berhubungan dengan tingkat kelancaran pemasaran dan promosi. Sulitnya pemasaran akan produk-produk kerajinan marmer setelah krisis moneter sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang diperoleh para pemilik usaha dan para buruh yang bekerja karena mereka menggantungkan hidupnya dengan menjadi buruh yang membuat kerajinan marmer. Untuk saat ini permintaan akan produk-produk kerajinan marmer memang tidak sejaya pada waktu sebelum terjadi krisis moneter. Konsumen lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu.

Menurut penulis agar pemasukan tetap ada pemilik usaha marmer haruslah tetap pandai untuk mencari pangsa pasar yang lebih menjanjikan dan mendesain produknya lebih menarik dan beragam dengan begitu konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk kerajinan marmer tersebut. Oleh karena itu sebagai pemilik usaha marmer harus pandai-pandai menyiasati agar pemasukan tetap ada, dengan begitu para buruh juga tetap mendapatkan borongan atau pesanan dalam jumlah banyak.

##### **4.7.2.2 Pemasaran Hasil Usaha**

Selain masalah keterbatasan modal usaha pemasaran merupakan salah satu masalah yang dihadapi UKM begitu pula yang terjadi pada para pemilik usaha marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung selalu mengeluhkan sulitnya memasarkan produk-produk mereka apalagi perekonomian negara yang belum begitu stabil membuat pemasaran akan produk-produk marmer juga mengalami kendala. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Suseno dalam Reposisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional bahwa, permasalahan pemasaran merupakan keselitan lain yang dihadapi oleh pengusaha UKM.

Kesulitan pemasaran pada umumnya terjadi akibat permintaan menurun akibat dari situasi ekonomi yang memburuk, seperti lemahnya daya beli masyarakat. Sementara itu belum semua UKM siap berorientasi untuk produk ekspor. Sebagai contoh, sejak krisis terjadi tahun 1997, daya beli masyarakat terus menurun, apadahal sifat permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh UKM justru bersifat elastis terhadap perubahan harga. Artinya kenaikan harga sedikit saja akan menurunkan permintaan cukup besar. Faktor lain adalah tidak mampu menjual pada harga pasar dan produk UKM yang tidak mampu bersaing, baik dalam kualitas maupun pelayanan

Selain Suseno dan Tambunan (2002:73), dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa, salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umumnya dihadapi oleh UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk-produk serupa buatan UB dan impor, maupun pasar ekspor.

Sepinya pasar lokal membuat para pengrajin marmer harus mencari pangsa pasar yang lebih luas. Apabila hanya mengandalkan dari pasar lokal saja sebagai pengusaha kerajinan marmer sulit untuk bertahan, karena biasanya pasar domestik itu hanya membeli produk untuk sekali sepanjang masa, apalagi untuk sekarang ini orang-orang lebih mengutamakan untuk kebutuhan primer. Oleh karena itu sebagai pemilik usaha marmer harus menerapkan sistem pemasaran jemput bola. Artinya, sebagai produsen jangan hanya menunggu *order* atau pembeli di Tulungagung, tetapi harus gencar mencari pasar, terutama ke daerah wisata yang banyak dikunjungi turis asing.

Di lain sisi terkadang para pengrajin marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap informasi tentang bisnis di pasar lokal maupun internasional. Menurut penulis terkadang mereka kurang peka terhadap perubahan selera dari konsumen, para pengrajin marmer. Hal ini dapat diketahui dari data di lapangan bahwa pengrajin membuat marmer dengan bentuk atau desain terbaru hanya apabila ada pemesan yang membawa contoh desainnya, sehingga kurang memiliki inovasi-inovasi dari produknya. Oleh karena itu agar produk mereka tetap dicari oleh konsumen, maka para pengrajin harus memiliki inovasi baru dan sering

mengakses internet untuk mengetahui desain yang banyak diminati oleh konsumen.

#### 4.7.2.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, industri kecil diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran melalui jumlah tenaga kerja yang terserap. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk Tulungagung yang kian tahun kian bertambah menuntut penyediaan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ada, karena yang terjadi saat ini jumlah pengangguran kian bertambah akan tetapi lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu mencukupi. Seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan Kerajinan (RIPPIK) disebutkan bahwa tujuan dari pembinaan dan pengembangan industri kecil adalah untuk memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Penulis memperoleh data di lapangan, menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap dari industri marmer dari tahun 2002 hingga tahun 2008 terus mengalami penurunan. Melihat hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah industri marmer yang dari tahun 2003 hingga saat ini terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Apabila kita melihat peran dan fungsi dari industri kecil yang dikatakan oleh Thohar (2002:3) bahwa industri kecil memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, melalui:

- a. Penyediaan barang dan jasa
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup

Melihat yang dijelaskan oleh Thohar bahwa industri kecil memiliki fungsi dan peran untuk penyerapan tenaga kerja, seharusnya industri marmer dan di Kabupaten Tulungagung juga dapat mengurangi angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja terutama yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut penulis, menurunnya jumlah tenaga kerja yang terserap dari industri marmer di Kabupaten Tulungagung dikarenakan banyak dari pemilik usaha yang mengurangi jumlah pekerjanya karena permintaan pasar akan kerajinan produk marmer sedang sepi sehingga tidak mampu untuk membayar pekerja. Selain itu menurunnya jumlah tenaga kerja yang terserap dari industri marmer di Kabupaten Tulungagung dikarenakan banyak dari penduduk Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang mengadu nasib bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

#### **4.7.3 Faktor Pendukung dan Penghambat atas Pemberdayaan Industri Kerajinan Marmer dilihat dari:**

##### **4.7.3.1 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan unsur-unsur yang memberikan dorongan untuk menunjang pelaksanaan pemberdayaan industri kerajinan marmer. Dalam faktor pendukung dan penghambat atas pemberdayaan UKM pada industri kerajinan marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dapat dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Analisis ini dilakukan dengan cara menentukan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang.

Analisis SWOT merupakan alat untuk mengukur variabel yang ditetapkan yang dinilai cukup efektif dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan industri marmer. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan industri marmer di Kabupaten Tulungagung adalah dengan melihat faktor-faktor internal dan eksternal, kesimpulan yang didapat untuk menganalisa faktor pendukung adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (kekuatan atau kelebihan)

Dari data yang diperoleh, hal-hal yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan UKM industri marmer adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) membuat suatu kebijakan yang disebut dengan RIPPIK (Rencana Induk Pembinaan

dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan) tujuan dengan dibentuknya kebijakan tersebut agar ada suatu langkah-langkah yang jelas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil di Tulungagung dengan harapan industri kecil yang ada di Tulungagung dapat maju dan berkembang.

- b. Adanya era otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan bahwa segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan tugas otonom dan tugas pembantuan dan di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal 14 ayat 1 yang disebutkan bahwa Kabupaten atau Kota memiliki urusan wajib yaitu memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai upaya penanggulangan sosial.

## 2. *Opportunity* (kesempatan atau peluang)

Dari data yang diperoleh yang menjadi peluang dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam perannya untuk memberdayakan industri marmer adalah industri kecil merupakan bagian terpenting dari perekonomian nasional karena sektor industri memberikan kontribusi dalam menciptakan struktur ekonomi nasional. Industri kecil merupakan kegiatan ekonomi yang memajukan struktur perekonomian Indonesia:

- a. Sebagian besar dari penduduk Desa Gamping Kecamatan Campurdarat bermatapencaharian di bidang industri kecil dengan membuat kerajinan marmer, hal ini disebabkan karena bahan baku yang diperlukan telah tersedia di daerah tersebut dan merupakan kesempatan untuk memanfaatkan potensi alam yang ada untuk meningkatkan pembangunan.
- b. Industri kecil merupakan bagian terpenting dari perekonomian nasional karena sektor industri memberikan kontribusi dalam menciptakan struktur ekonomi nasional. Industri kecil merupakan kegiatan ekonomi yang mendongkrak struktur perekonomian Indonesia.

Menurut penulis, kedua analisis diatas merupakan faktor pendukung yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan pada industri kerajinan marmer dimana kekuatan (*strength*) dan kesempatan atau peluang (*opportunity*), keduanya merupakan unsur yang mampu mendorong kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah diwujudkan dalam RIPPIK. Faktor pendukung dari dinas atau internal inilah yang mampu menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemberdayaan industri kerajinan marmer. Selain itu terdapat juga faktor eksternal yang berasal dari pengrajin yaitu dengan keahlian yang dimiliki oleh pengrajin marmer mereka dapat memberikan motivasi untuk dirinya pribadi agar memiliki kepercayaan diri untuk mandiri sehingga industri marmer mampu berkembang di pasaran baik didalam maupun diluar negeri.

Faktor pendukung yang telah diuraikan diatas berasal dari kelebihan yang dimiliki UKM sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Thoah (2000:28), antara lain:

- 16) Pemilik merangkap manager perusahaan dan menjalankan semua fungsi manajerial seperti marketing, finansial dan administrasi.
- 17) Dalam pengelolaannya tidak memerlukan keahlian manajerial yang handal.
- 18) Sebagian besar membuat lapangan kerja baru, inovasi sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru.
- 19) Resiko menjadi beban pemilik.
- 20) Bebas menentukan harga produksi barang dan jasa.
- 21) Prosedur hukumnya sederhana.
- 22) Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajak adalah pribadi atau pengusaha bukan perusahaan.
- 23) Mudah dalam proses pendirian.

Dari kelebihan yang dimiliki UKM selama ini seharusnya UKM lebih mampu melakukan peningkatan usaha yang dimiliki, khususnya pada industri kerajinan marmer di Desa Gamping. Kelebihan tersebut dapat digunakan sebagai faktor pendukung dalam rangka meningkatkan daya saing UKM di tingkat internasional. Hal ini tidak hanya dilihat dari pendukung kedinasan saja, melainkan dari

pengrajin juga memiliki pengaruh kuat dalam memberdayakan industri kerajinan marmer sehingga mampu membantu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah.

#### 4.7.3.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal yang membuat kegiatan pemberdayaan menjadi tidak lancar seperti apa yang diharapkan. Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan industri kerajinan marmer yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. *Weakness* (kelemahan atau kekurangan)

Dari data yang diperoleh yang menjadi kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam perannya untuk memberdayakan industri marmer adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Tulungagung seharusnya mengupayakan adanya anggaran dana yang lebih untuk membantu kegiatan operasional agar tujuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk dapat mengembangkan industri kecil yang ada di Tulungagung dapat tercapai karena yang terjadi selama ini dana yang tersedia dari APBD sangat terbatas untuk kegiatan operasional.
- b. Sumber Daya Manusia dari Pembina Teknis yang ada untuk membantu diklat masih sangat kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pembina Teknis haruslah memiliki kemampuan yang lebih jika dibandingkan dengan pengrajin dan harus benar-benar menguasai secara teknis tentang industri marmer yang harus ditunjang dengan latar belakang pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berkaitan dengan komoditi yang dibina.

2. *Threat* (ancaman atau kendala)

Dari data yang diperoleh, hal yang menjadi ancaman dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam peranannya untuk memberdayakan industri marmer adalah:

- a. Kondisi perekonomian bangsa yang belum stabil mengakibatkan pemasaran kerajinan marmer mengalami kendala karena banyak orang yang mementingkan kebutuhan yang lebih pokok.

- b. Menurunnya permintaan konsumen menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang bekerja pada industri marmer dan akhirnya memilih untuk bekerja ke luar negeri.
- c. Persaingan pasar yang semakin ketat sehingga banyak yang membuat kerajinan serupa. Oleh karena persaingan pasar yang semakin ketat haruslah dijawab sebagai suatu tantangan agar lebih kreatif untuk dapat menciptakan produk-produk baru yang tidak kalah bersaing agar dapat diterima di pasaran, tanpa adanya kepekaan dan kreatifitas yang tinggi dari pengrajin untuk dapat membuat sesuatu yang baru pastinya produk kita akan kalah bersaing dengan produk yang lain yang lebih dapat mengerti dan mengikuti selera pasar. Oleh karena itu inovasi dan inovasi sangatlah diperlukan.

Dari kedua analisis diatas dapat diketahui bahwa kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) merupakan faktor penghambat yang terdapat dalam kegiatan pemberdayaan industri kerajinan marmer. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh Wuri dalam Suseno, Sulistyowati dan Desembriarto (2005:46) antara lain:

- i. Keterbatasan modal kerja, termasuk untuk investasi
- j. Kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau
- k. Keterbatasan teknologi, karena sebagian besar UKM masih menggunakan mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual
- l. Keterbatasan SDM dengan kualitas baik, karena sebagian besar pengusaha, UKM masih lulusan pendidikan primer.
- m. Kesulitan dalam pemasaran, karena kualitas produk dan kegiatan promosi masih kurang sehingga ada persaingan dari produk-produk sejenis, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.
- n. Ketidaksiapan UKM sendiri, karena UKM tidak mempunyai pengetahuan tentang pasar dan jaringan pemasaran sehingga sering UKM tergantung pada para tengkulak

Menurut penulis, kesimpulan yang dapat ditarik dari faktor penghambat diatas adalah dengan adanya dalam suatu kegiatan pasti selalu ada hambatan yang dialami. Kegiatan pemberdayaan industri kerajinan marmer ini, dapat diketahui adanya hambatan yang berhubungan dengan keterbatasan informasi, modal, pengetahuan teknologi dan kemampuan manajerial dari pengrajin juga masih kurang. Hal inilah yang seharusnya dikurangi dalam pelaksanaan pemberdayaan industri kerajinan marmer di Desa Gamping dengan cara mendatangkan pembina teknis yang profesional untuk memberikan pengetahuan mengenai kemajuan teknologi atau peralatan industri, khususnya marmer. Kemudian mereka juga dapat mengajarkan tentang bagaimana cara untuk membuat sistem manajemen yang sesuai untuk kemajuan industri marmer. Selain itu dalam hal peningkatan SDM dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pengrajin untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai akses pasar dan peningkatan kualitas produksinya sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Apabila dilihat dari hambatan yang dialami pengrajin marmer, sesuai dengan penelitian di lapangan, selain keterbatasan akses informasi juga dari pihak pemerintah kurang melakukan proteksi terhadap pesaing dari luar negeri yang datang ke Indonesia yang kemudian membuka *show room* produksi marmer dengan harga yang lebih murah. Para pesaing inilah yang menyebabkan para pengrajin menjadi tidak sejaya dulu. Oleh karena itu untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara pendatang baru dengan pengrajin marmer ini, pemerintah harus bisa lebih melakukan proteksi terhadap industri marmer agar tidak menurun kualitasnya dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) industri kerajinan marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tiap tahun jumlahnya mulai mengalami peningkatan seperti yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung walaupun peningkatannya terlihat tidak terlalu besar. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berusaha untuk mengembalikan kejayaannya mengingat kontribusi yang diberikan oleh industri marmer tersebut sangat besar. Peranan Pemerintah dalam pemberdayaan industri kerajinan marmer telah dituangkan kedalam RIPPIK (Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan) yang merupakan kebijakan pemerintah dari hasil diskusi antara Bupati Kabupaten Tulungagung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Didalamnya terdapat kegiatan pemerintah mengenai pembinaan pengrajin marmer dengan cara penyediaan modal usaha, pemanfaatan fasilitas teknologi, dan pembinaan sumber daya manusia. Dari segi permodalan pemerintah membantu memberikan rekomendasi kepada pengrajin marmer untuk diserahkan kepada BPR dalam rangka menerima pinjaman modal. Selanjutnya pemanfaatan fasilitas teknologi dilakukan pemerintah dengan cara memberikan fasilitas dengan membantu sarana dan prasarana yang diperlukan meskipun tidak keseluruhan dan membantu memberikan informasi mengenai kemajuan teknologi yang sekarang ini mampu menjadikan usaha marmer menjadi berkembang dengan peralatan yang canggih atau modern. Dalam hal pembinaan SDM dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan oleh pembina teknis kepada para pengrajin marmer. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar karena terbatasnya biaya.

2. Hal yang tetap menjadi kendala bagi perkembangan industri marmer hingga saat ini berasal dari segi permodalan dan pemasaran hasil usaha. Dampak yang terjadi dari kejadian tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan, pemasaran hasil usaha dan penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan dari pengrajin marmer terlihat bahwa setelah krisis jumlah pendapatan menurun, tidak seperti sebelum terjadi krisis. Akan tetapi yang tetap bertahan dan dalam kondisi stabil juga tetap ada. Selain itu permintaan pesanan konsumen untuk industri marmer menjadi sepi akibat adanya krisis ekonomi. Selanjutnya dilihat dari pemasaran hasil usaha juga dirasa kurang karena sebagian besar pemilik usaha marmer memiliki pendidikan rendah maka kurang mampu untuk mengakses informasi dari luar negeri. Hal lain yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan UKM marmer ini juga dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang menjadi semakin berkurang karena pengrajin yang gulung tikar akibat krisis ekonomi lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKI, tetapi ada juga yang masih bertahan untuk melanjutkan usahanya meskipun keadaannya pasang surut.
3. Dalam melakukan pemberdayaan industri marmer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mewarnai pelaksanaan kegiatan ini. Faktor pendukung antara lain, dengan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah para pengrajin mampu meningkatkan kualitas produk mereka. Pada masa pembangunan saat ini bukan merupakan ancaman bagi upaya pengembangan industri dan perdagangan, namun sebaliknya justru memberikan kesempatan dan dukungan bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan. Oleh karena itu peran serta dari pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan industri kecil sangat dibutuhkan agar UKM ini dapat berkembang lebih pesat, sehingga mampu meningkatkan hasil pembangunan dan pendapatan daerah.

## 5.2 Saran

Penelitian akan lebih sempurna dan nyata apabila dikemukakan saran dari penulis untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan yang dilakukan di lapangan. Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam rangka menunjang pemberdayaan UKM marmer di Kabupaten Tulungagung hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menyusun suatu kebijakan khusus sektor industri marmer, sehingga proses pemberdayaan UKM marmer dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Upaya untuk membantu memberikan modal usaha seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung juga ikut menentukan siapa saja yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan tersebut.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan proteksi untuk lebih memperketat dan mengawasi masuknya para pesaing pendatang baru yang berasal dari negara lain agar para pengrajin marmer tidak mengalami kerugian dan tetap berjaya di Kabupaten Tulungagung sehingga kebanggaan akan tetap dimiliki karena potensi terbesar untuk menunjang perekonomian daerah, industri marmer sangat berperan. Hal ini sangat berpengaruh bagi peningkatan pendapatan penduduk, khususnya pengrajin marmer. Pengenalan produk teknologi baru yang berasal dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi marmer itu sendiri dan memperluas akses pasar untuk lebih mengenalkan produk dari industri yang mampu memberikan suatu sentuhan keindahan dengan bentuk dan warnanya sehingga segala kendala yang dihadapi oleh pengrajin ataupun pemerintah mampu teratasi dengan baik. Selain itu pemerintah seharusnya memberikan program untuk mengajarkan pengetahuan tentang manajemen kepada para pengrajin agar mereka dapat memisahkan antara pengeluaran rumah tangga dan untuk industri itu sendiri.
3. Dalam rangka menghadapi persaingan dalam dunia industri yang semakin maju, diharapkan pemerintah mampu untuk lebih meningkatkan faktor pendukung yang telah tersedia guna menunjang keberhasilan proses pemberdayaan dan mengurangi faktor penghambat yang membuat industri marmer menjadi terpuruk. Dengan demikian industri kerajinan marmer akan

tetap mampu mempertahankan hasil industrinya untuk ditingkatkan lebih baik lagi sekaligus mampu memberikan kontribusi penting bagi pendapatan dan pembangunan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Sudantoko, Djoko. 2001. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP. STIE-YKPN.
- Bryant, C. and White, L. G. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3S.
- Chambers, R. 1995. "Poverty And Livelihoods: Whose Reality Count? Dalam *Uner Kirdar Dan Leonard Silk (ed). People From Impoverishment To Empowerment*". New York: New York University
- Combs, Philip H. dan Manzoor Ahmed. 1985. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics Of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karseno, A.R. 2005. *Strategi Pengembangan UKM Dalam Meningkatkan Produktivitas. Sidang Pleno ISEI XI "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru"*. Jakarta 22-23 Maret.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Gidesindo.
- Kartini, Kartono. 1976. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Alumni.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. ed.3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lembar Bacaan Balai Besar PMD. 2005. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. BBPMD: Malang.
- Milles, Mathew and Hubberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mubyarto. 1998. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Muluk, Khairul. M.R. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Pranarka, A.M.W dan Omni S. Prijono, 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, S.P. 1983. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun dan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta :LP3ES.
- Soetomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Suprpto, Riyadi. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Malang: UN Press.
- Suprpto, R.R. 2002. *Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial: Strategi dan Model Pembinaan dan Pengembangan UKM Kota Pasuruan*.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus dan Nugroho, Trilaksono. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia.

Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.

Tjokroamidjojo, B. dan Mustopadidjaja. 1988. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Cetakan Keenam. Jakarta: Haji Mas Agung.

Tjokroamidjojo, M. 1987. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Thohar, Mahmud, Tulus TH Tambunan, Carunia Mulya Firdausy. 1998. *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap Industri Kecil*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Triyuwono, Iwan dan Yustika Ahmad Erani. 2003. *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*. Malang. Bayumedia Publising.

T.W. Hg. Suseno, Sulistyono, Firma dan Desembriarto, Dionysius. 2005. *Reposisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional* Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2008

Kecamatan Campurdarat Dalam Angka 2007/2008

Desa Gamping Dalam Angka 2007/2008

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan (RIPPIK) tahun 2001-2010

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Internet**

Kartasasmita, G. 1996. *“Strategi Pengembangan Usaha Kecil”*, diakses pada tanggal 15 Desember 2009 dari <http://ginandjar.com>.

Dh, Wiwiek. 2005. *“Sentuhan Buat Sang Marmer”*, diakses pada tanggal 20 Desember 2009 dari <http://www.kompas.com>.



Lampiran  
Gambar Proses Pembuatan Kerajinan Marmer





Lampiran  
Gambar Produk Industri Kerajinan Marmer







## PERTANYAAN UNTUK DISPERINDAG

1. Bagaimana kondisi marmer di Tulungagung pada saat ini ?
2. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan UKM industri marmer di Tulungagung?
3. Bagaimana perkembangan ekspor marmer dari pada saat ini?
4. Bagaimana peran dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan industri marmer ?
5. Dampak apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pemberdayaan industri marmer?
6. Apa saja faktor pendukung yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan industri marmer di Tulungagung?
7. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh industri kecil marmer di Tulungagung?
8. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh industri kecil marmer di Tulungagung ?
9. Apakah dengan adanya industri marmer ini telah membawa pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja?
10. Bantuan apa saja yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal pemasaran?
11. Apakah selama ini ada kebijakan dari Bupati Tulungagung yang menyangkut tentang pemberdayaan industri marmer ?

## PERTANYAAN UNTUK PENGRAJIN

1. Bagaimana kondisi dan perkembangan usaha marmer pada saat ini?
2. Apa saja kendala yang dialami selama menjalankan usaha ini?
3. Peran apa saja yang dilaksanakan selama ini dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung bagi pengembangan industri marmer ?
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan agar usaha tetap berjalan ?
5. Bagaimana cara yang ditempuh untuk memasarkan produk marmer ?
6. Kemana saja produk marmer ini dipasarkan?
7. Bagaimana pendapatan yang didapat dari usaha marmer selama ini ?

